



# RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
**TAHUN 2025-2029**

 [bptdyogyakarta@gmail.com](mailto:bptdyogyakarta@gmail.com)

 [bptd\\_yogyakarta](https://www.instagram.com/bptd_yogyakarta)

 Jl. Babarsari TB-V No.11 Caturtunggal, Depok Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281



## KATA PENGANTAR

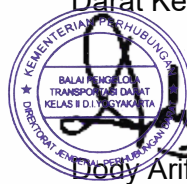
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai ketentuan muatan dari dokumen ini telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025) dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman utama bagi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, integrasi, pelayanan dan keselamatan transportasi darat yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia selama periode 2025-2029.

Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, perkembangan global, serta aspirasi masyarakat. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem transportasi yang modern, inklusif, dan terintegrasi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi Kementerian Perhubungan dengan penuh tanggung jawab dan integritas

Yogyakarta, 31 Desember 2025  
Kepala Balai Pengelola Transportasi  
Darat Kelas II D.I.Yogyakarta



Dody Arifianto, S.T., M.M.Tr  
NIP. 19820803 200312 1 006

## DAFTAR ISI

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b> | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>     | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>v</b>  |

### BAB 1 PENDAHULUAN

|                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1. Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta.....                      | 1 |
| 1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta.....                 | 1 |
| 1.1.2 Capaian Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..... | 4 |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan .....                                                                       | 9 |

### BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta<br>Tahun 2025-2029 .....         | 21 |
| 2.2. Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun<br>2025-2029 .....                  | 23 |
| 2.3. Tujuan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Tahun 2025-<br>2029..... | 24 |

### BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun<br>2025-2029.....                    | 50 |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat<br>Kelas II D.I.Yogyakarta ..... | 57 |

### BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. Target Pencapaian Sasaran Kegiatan.....                                                   | 61 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta ..... | 66 |
| 4.3. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Renstra Balai Pengelola                             |    |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029..... | 70 |
| BAB 5 PENUTUP                                                   |    |
| 5.1. Kesimpulan .....                                           | 79 |
| 5.2. Arahan Pimpinan.....                                       | 79 |
| 5.3. Mekanisme Evaluasi .....                                   | 80 |

## DAFTAR TABEL

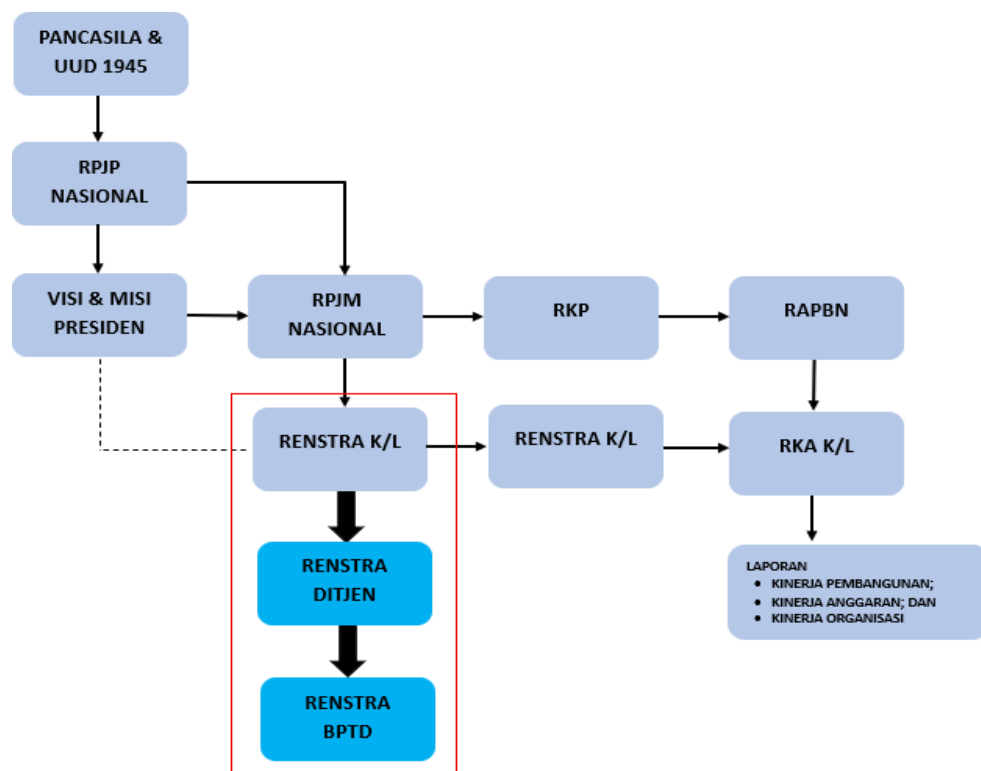
|            |                                                                                                                                 |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. | Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat<br>Kelas II<br>D.I.Yogyakarta.....                               | 2  |
| Tabel 1.2. | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi<br>Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024<br>.....       | 5  |
| Tabel 1.3. | Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta<br>Tahun 2020-2024 .....                          | 7  |
| Tabel 1.4. | Jumlah Kejadian dan Keparahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas<br>2019-2023 .....                                                  | 12 |
| Tabel 2.1. | Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan .....                                                                                   | 27 |
| Tabel 2.2. | Manual Perhitungan Indikator Kegiatan.....                                                                                      | 30 |
| Tabel 2.3. | Manual Perhitungan Indikator Kegiatan.....                                                                                      | 45 |
| Tabel 3.1. | Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat .....                                                                      | 51 |
| Tabel 3.2. | Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Direktorat<br>Jenderal Perhubungan Darat .....                        | 54 |
| Tabel 3.3. | Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Balai<br>Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta..... | 58 |
| Tabel 4.1. | Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat<br>Kelas II<br>D.I.Yogyakarta.....                         | 62 |
| Tabel 4.2. | Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat<br>Kelas II<br>D.I.Yogyakarta.....                                        | 65 |
| Tabel 4.3. | Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Renstra BPTD Kelas II<br>D.I.Yogyakarta<br>.....                                          | 71 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                    |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. | Bagan Susunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta ....      | 3  |
| Gambar 1.2. | Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .....                                | 12 |
| Gambar 1.3. | Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan .....                                     | 17 |
| Gambar 2.1. | Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 .....                         | 21 |
| Gambar 2.2. | Peta Strategi (Strategy Map) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 ..... | 24 |

## BAB 1 PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi panduan bagi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta dalam menyusun kebijakan dan anggaran tahunan selama periode 2025-2029. Renstra ini merupakan hasil turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.



**Gambar I. 1** Alur Penyusunan Perencanaan

Renstra juga harus mampu mengukur pencapaian tujuan dan sasaran melalui pengukuran kinerja yang berkesinambungan. Hal ini melibatkan hubungan antara indikator kinerja, arah kebijakan, strategi implementasi dan evaluasi tahunan dan lima tahunan untuk memberikan masukan dalam perencanaan dan penganggaran ke depan.

### 1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta

Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas

II D.I.Yogyakarta sebagai batasan ruang lingkup, serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun sebelumnya.

#### **1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagaimana disampaikan pada **Tabel 1.1**.

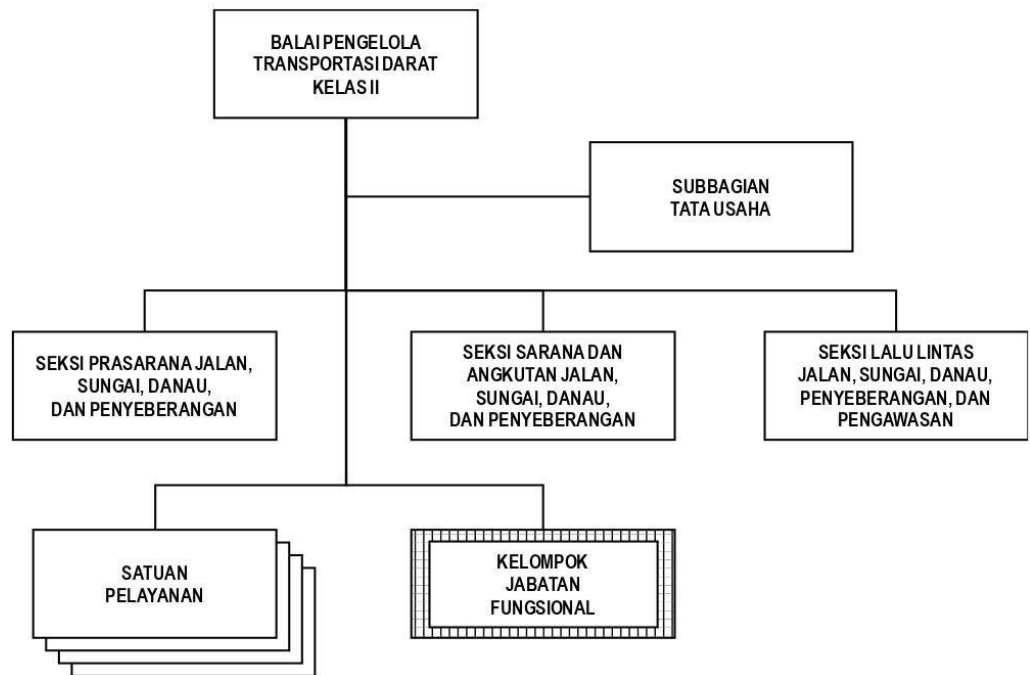
**Tabel 1.1** Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta

| No. | ASPEK          | PENGATURAN DALAM PM 1 Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kedudukan BPTD | Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.                                                                                                                                                                                             |
| 2.  | Tugas BPTD     | Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan, Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Sarana, Prasarana, Lalu lintas dan angkutan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Fungsi yang dilaksanakan oleh BPTD | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan;</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan</li> </ol> |
|    |                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;</li> <li>5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;</li> <li>6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan</li> <li>7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.</li> </ol>                 |

**Sumber:** PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Susunan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 1.1** : Bagan Susunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II  
D.I.Yogyakarta

### **1.1.2 Capaian RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024**

Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta 2023-2024 dirumuskan berdasarkan sasaran nasional pembangunan pada sektor transportasi pada RPJMN 2020-2024. Sasaran Kegiatan ini juga memperhatikan visi misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan permasalahan pembangunan yang terjadi pada periode tersebut. Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta 2023-2024 diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan atau IKK. Tabel I.2 menyajikan capaian indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta 2023-2024.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta pada Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2023-2024 memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan. Realisasi dan capaian kinerja program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2023-2024 dijelaskan pada Tabel I.2, dimana terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tabel I.2 menggambarkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta hingga tahun 2023 beserta target yang hendak dicapai pada tahun 2024.

**Tabel 1.2** Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2023-2024

| NO<br>(1) | SASARAN KEGIATAN<br>(2)                                                                    | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN<br>(3)                                                   | SATUAN<br>(4) | REALISASI<br>S.D 2023<br>(5) | TARGET<br>S.D 2024<br>(6) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 1         | SK1<br>Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK1.2<br>Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda  | Lokasi        | -                            | 3                         |
|           |                                                                                            | IKK1.3<br>Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi                | Lokasi        | 2                            | 2                         |
|           |                                                                                            | IKK1.6<br>Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi                                      | Lokasi        | -                            | 2                         |
| 2         | SK2<br>Meningkatnya Kinerja pelayanan transportasi darat                                   | IKK2.1<br>Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A | %             | 65                           | 75                        |
|           |                                                                                            | IKK2.2<br>Persentase Penerapan SMART terminal tipe A                                | %             | -                            | 65                        |
|           |                                                                                            | IKK2.3<br>Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP   | %             | 20                           | 35,7                      |
| 3         | SK4<br>Meningkatnya keselamatan transportasi darat                                         | IKK4.1<br>Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal | %             | 8,5                          | 10                        |
|           |                                                                                            | IKK4.2<br>Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat   | %             | 20                           | 14                        |
|           |                                                                                            | IKK4.5<br>Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang                             | Orang         | -                            | 350                       |

| NO  | SASARAN KEGIATAN                                                             | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                          | SATUAN | REALISASI S.D 2023 | TARGET S.D 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                                          | (3)                                                                 | (4)    | (5)                | (6)             |
|     |                                                                              | keselamatan transportasi jalan                                      |        |                    |                 |
|     |                                                                              | IKK4.6 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor | %      | 100                | 100             |
| 4   | SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat | IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat  | Nilai  | 70                 | 80              |
| 5   | SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                | IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat | Nilai  | 70                 | 80              |

**Tabel 1.3** Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024

| Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                                            | Satuan | Tahun 2023 |     |                    | Tahun 2024 |      |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|--------------------|------------|------|-------------|
|                                             |                                                                                            |        | T          | R   | C                  | T          | R    | C           |
| <b>SK 1.</b>                                | <b>Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi</b> |        |            |     |                    |            |      | <b>100%</b> |
| IKK1.2                                      | Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda                   | Lokasi | -          | -   | -                  | 3          | 3    | 100%        |
| IKK1.3                                      | Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi                                 | Lokasi | 2          | 2   | 100%               | 2          | 2    | 100%        |
| IKK1.6                                      | Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                                       | Lokasi | -          | -   | -                  | 2          | 2    | 100%        |
| <b>SK 2.</b>                                | <b>Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat</b>                                   |        |            |     |                    |            |      |             |
| IKK2.1                                      | Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A                  | %      | 65         | 65  | 100%               | 75         | 75   | 103,8%      |
| IKK2.2                                      | Persentase Penerapan SMART terminal tipe A                                                 | %      | -          | -   | -                  | 65         | 65   |             |
| IKK2.3                                      | Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP                    | %      | 20         | 20  | 100%               | 35,7       | 35,7 | 100%        |
| <b>SK 4.</b>                                | <b>Meningkatnya keselamatan transportasi darat</b>                                         |        |            |     |                    |            |      |             |
| IKK4.1                                      | Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal                  | %      | 8,5        | 8,5 | 100%               | 10         | 10   | 100%        |
| IKK4.2                                      | Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat                                 | %      | 20         | 20  | 100%               | 14         | 14   | 100%        |
| IKK4.5                                      | Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan               | Orang  | -          | -   | -                  | 350        | 350  | 100%        |
| IKK4.6                                      | Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                               | %      | 100        | 100 | 100%               | 100        | 100  | 100%        |
| <b>SK 5.</b>                                | <b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat</b>            |        |            |     |                    |            |      |             |
| IKK5.1                                      | Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat                                | Nilai  | 70         | 70  | 100% <sup>13</sup> | 80         | 80   | 100%        |
| <b>SK 1.</b>                                | <b>Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel</b>                           |        |            |     |                    |            |      |             |
| IKK1                                        | Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat                               | Nilai  | 70         | 70  | 100%               | 80         | 80   | 100%        |

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan pada Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta 2025-2029 menggunakan pendekatan identifikasi isu strategis dan analisis situasional pada sektor perhubungan darat. Identifikasi isu strategis dilakukan untuk menemukan permasalahan yang perlu dijawab dalam jangka menengah. Sementara itu, analisis situasional dilakukan untuk menemukan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sektor perhubungan darat.

Isu strategis BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### 1. Masih tingginya fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan

Tingginya jumlah kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Perbandingan data kecelakaan lalu lintas jalan pada rentang tahun 2019-2023 menunjukkan tren peningkatan jumlah kecelakaan dan keparahan korban lalu lintas selama empat tahun terakhir. Jumlah kejadian kecelakaan dan korban meninggal pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu: 152.008 kejadian kecelakaan lalu lintas jalan dan 27.895 korban meninggal dunia.

Sebaliknya, perbandingan keparahan korban kecelakaan lalu lintas selama rentang tahun 2019-2023 menunjukkan tren berbeda, yaitu: penurunan indeks fatalitas korban meninggal per kejadian kecelakaan dan rasio fatalitas korban meninggal per total korban kecelakaan selama rentang tahun 2019-2023. Keparahan korban kecelakaan pada tahun 2023 adalah paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu: indeks fatalitas korban meninggal per kejadian kecelakaan lalu lintas adalah 0,18 dan rasio fatalitas korban meninggal dunia per total korban kecelakaan adalah 12,45 persen.

**Tabel 1.4** Jumlah Kejadian dan Keparahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas  
2019-2023

|                                     | Satuan          | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kecelakaan Lalu Lintas              | kejadian        | 116.411 | 100.028 | 103.645 | 137.851 | 152.008 |
| Korban Kecelakaan                   |                 |         |         |         |         |         |
| - Meninggal Dunia                   | orang           | 25.671  | 23.529  | 25.266  | 27.531  | 27.895  |
| - Luka Berat                        | orang           | 12.475  | 10.751  | 10.553  | 13.230  | 15.154  |
| - Luka Ringan                       | orang           | 137.342 | 113.518 | 117.913 | 163.686 | 180.920 |
| <b>Total Korban</b>                 | orang           | 175.488 | 147.798 | 153.732 | 204.447 | 223.969 |
| Keparahan Korban                    |                 |         |         |         |         |         |
| - Korban meninggal per kejadian     | MD/kejadian     | 0,22    | 0,24    | 0,24    | 0,20    | 0,18    |
| - Korban Meninggal per Total Korban | MD/Total Korban | 14,63%  | 15,92%  | 16,44%  | 13,47%  | 12,45%  |

*Sumber: diolah dari data Korlantas Polri pada PDDA 2023*

Penurunan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan menunjukkan adanya perbaikan kinerja keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Namun, spirit perbaikan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada nilai bahwa sudah terlalu banyak orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia.



**Gambar 1.2** Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

*Sumber: diolah dari data Korlantas Polri pada PDDA 2023*

Fatalitas korban kecelakaan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 3-4 orang meninggal dunia per jam akibat kecelakaan lalu lintas, satu dari delapan korban

kecelakaan lalu lintas jalan meninggal dunia, dan satu orang meninggal meninggal dunia tiap enam kejadian kecelakaan lalu lintas jalan.

Kecelakaan lalu lintas jalan disebabkan oleh kombinasi faktor manusia, kendaraan, dan jalan (dan lingkungan), dan interaksi masing-masing faktor tersebut. Perubahan paradigma keselamatan jalan diperlukan dengan tidak hanya fokus pada penurunan jumlah kecelakaan (*traditional approach*), tetapi menjadi kombinasi antara *traditional approach* dan *safe system approach* dengan fokus pada pengurangan fatalitas.

Guna meningkatkan kinerja keselamatan LLAJ, Pemerintah menyusun Perpres No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RUNK LLAJ. RUNK LLAJ menggunakan pendekatan 5 pilar meliputi: Sistem yang Berkeselamatan atau *Safer System*, Jalan yang Berkeselamatan atau *Safer Roads*, Kendaraan yang Berkeselamatan atau *Safer Vehicles*, Pengguna Jalan yang Berkeselamatan atau *Safer People*, dan Penanganan Korban Kecelakaan atau *Post Crash Responses*.

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peran penting dalam pelaksanaan RUNK LLAJ sebagai koordinator Pilar 3 (Kendaraan yang Berkeselamatan) maupun instansi penanggung jawab dan pendukung pada Pilar 1 (Sistem yang Berkeselamatan), Pilar 2 (Jalan yang Berkeselamatan), dan Pilar 4 (Pengguna Jalan yang Berkeselamatan).

Evaluasi kinerja keselamatan LLAJ berbasis faktor penyebab kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan untuk mengetahui kontribusi pilar bagi perbaikan kinerja keselamatan LLAJ. Kontribusi tiap pilar ini diturunkan menjadi dasar penetapan kontribusi masing-masing stakeholder keselamatan jalan, termasuk Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja masih berbentuk kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap penurunan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Tantangan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk meningkatkan kontribusi bagi perbaikan kinerja keselamatan jalan perlu difokuskan pada suatu kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang fatal dan berulang dengan penyebab yang sama. Penanganan keselamatan LLAJ perlu ditinjau dari akar masalah

penyebab kecelakaan. Sebagai contoh adalah kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan angkutan umum (orang atau barang).

Secara konseptual, keterlibatan kendaraan angkutan umum pada kecelakaan lalu lintas jalan memiliki karakteristik *low frequency, high consequence*. Temuan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan umum patut diduga bahwa faktor awak kendaraan hanyalah simptom penyebab kecelakaan.

Berlangsungnya fragmentasi industri angkutan umum ditandai oleh perusahaan angkutan umum hanya mengoperasikan jumlah armada sedikit dan tidak memenuhi skala keekonomian untuk menjalankan bisnis angkutan umum. Untuk bertahan dalam bisnis, perusahaan angkutan umum melakukan maksimalisasi utilisasi aset dan memotong biaya, sehingga meningkatkan risiko yang membahayakan keselamatan LLAJ. Pola pikir *good business is good safety* perlu dibangun untuk mendorong konsolidasi industri angkutan umum agar pengoperasian armada angkutan umum mampu memenuhi skala keekonomian dan pada akhirnya mampu menurunkan keterlibatan dalam kecelakaan lalu lintas jalan yang fatal.

## 2. Konektivitas Wilayah Daratan

Moda angkutan jalan memiliki karakteristik yang berbeda dengan moda angkutan lain. Moda angkutan jalan memiliki karakteristik layanan dari pintu-ke-pintu. Sebaliknya, moda angkutan lain, yaitu: moda rel, air, dan udara memiliki karakteristik layanan simpul-ke-simpul. Perbedaan karakteristik ini memberikan peran strategis bagi moda angkutan jalan untuk menghubungkan seluruh wilayah daratan atau menjadi layanan *first and last miles* bagi moda angkutan lainnya.

Angkutan jalan menjalankan fungsi *servicing* untuk melayani perjalanan orang antar kota yang menghubungkan antar terminal penumpang tipe A/simpul transportasi/pusat kegiatan (KSN, Food Estate, KE, KI).

Pembangunan jalan tol antar kota mengungkit perjalanan antar kota dengan kendaraan pribadi secara masif. Respon perencanaan dilakukan dengan restrukturisasi trayek angkutan AKAP via tol dan non tol untuk meningkatkan daya saing angkutan AKAP. Restrukturisasi trayek ini perlu ditindaklanjuti dengan revisi *time table* perjalanan antar kota. Dukungan perencanaan MRLL pada

koridor utama pulau diperlukan untuk meningkatkan kelancaran perjalanan angkutan antar kota.

### 3. Penanganan kendaraan angkutan barang *over dimension* dan *over load* atau ODOL

Moda jalan masih mendominasi *modal share* transportasi barang nasional. Hampir sembilan puluh dua persen transportasi barang di Indonesia menggunakan moda jalan.<sup>1</sup> Pada saat bersamaan, permasalahan angkutan barang yang *over dimension* dan *over load* atau ODOL belum mampu ditangani sepenuhnya.

Fenomena angkutan barang ODOL menimbulkan eksternalitas negatif berupa kejadian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan maupun kerugian ekonomi akibat kerusakan jalan. Sebanyak 17 persen kejadian kecelakaan lalu lintas jalan pada Tahun 2023 dikontribusikan oleh kendaraan ODOL. Sementara itu, kerugian ekonomi akibat ODOL berupa penurunan umur jalan dari 10 tahun menjadi 3 tahun sebesar 43,45 triliun rupiah selama sepuluh tahun.

Namun, penanganan ODOL perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu masalah. Permasalahan *over dimension* dan *over loading* atau ODOL bukan

hanya masalah sektor angkutan barang jalan saja, tetapi juga bersifat lintas sektor. Faktor penyebab perilaku ODOL antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya tata niaga komoditas menyebabkan peningkatan jumlah dan jarak perjalanan. Akibatnya, pergerakan angkutan barang menjadi acak dan biaya transportasi meningkat;
  - b. Minimnya pusat konsolidasi barang, angkutan peti kemas masih terbatas;
  - c. Pemisahan peran dalam penyediaan armada barang antara APM kendaraan dan industri karoseri, serta kepentingan bisnis transporter dan pemilik barang menimbulkan moral hazard dari perilaku *over dimension*;
  - d. Fragmentasi industri angkutan barang jalan, moral *hazard* perilaku *over load* dari operator angkutan kecil;
  - e. *Empty backhaul* muatan angkutan barang (<50%); dan
4. Kepastian hukum untuk penegakan pelanggaran ODOL.
- Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan hanya pada angkutan barang khusus berbahaya dan tidak berbahaya. Sementara itu, kewenangan angkutan barang umum dijalankan oleh pemerintah daerah. Pada tahap awal, penanganan ODOL difokuskan pada pada angkutan barang khusus. Tahap berikutnya, pemerintah daerah didorong untuk terlibat dalam penanganan ODOL untuk angkutan barang umum.
5. Kebutuhan *Actual Data*
- Kebutuhan sistem informasi pengembangan data aktual untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja transportasi jalan. Permasalahan transportasi jalan di Indonesia perlu diselesaikan dengan pemanfaatan pangkalan data yang bersifat actual (actual data). Actual data ini mempermudah kinerja pemerintah untuk mengidentifikasi dan menganalisis

permasalahan, membuat keputusan, meningkatkan kualitas respons darurat melalui identifikasi titik-titik permasalahan, serta membuat kinerja pemerintah lebih efisien.

Analisis situasional bidang perhubungan darat dilakukan dengan pendekatan PESTEL Analysis sebagai berikut:

a. Political

1. Jaringan transportasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Layanan angkutan tidak boleh terputus oleh pembagian kewenangan pada sektor perhubungan;
2. Permasalahan sektor transportasi darat (logistik, keselamatan, angkutan perkotaan) bersifat lintas sektor, perlu conductor untuk orkestrasikan penanganan masalah.

b. Economic

1. Masih tingginya biaya logistik. 80% biaya logistik disumbang oleh transportasi. Sektor transportasi darat, termasuk kereta api berkontribusi terhadap 50% dari total biaya transportasi; dan
2. Target pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2029 adalah 8%. Kawasan perkotaan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

c. Social

1. Tren urbanisasi terhadap perkembangan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi; dan
2. Penduduk di DTPK termarginalkan oleh minimnya aksesibilitas

d. Technology

1. Pengaruh disrupsi TIK pada perubahan perilaku masyarakat dalam perjalanan; dan
2. Perkembangan teknologi otomotif berbahan bakar listrik untuk mengurangi ketergantungan sektor transportasi pada penggunaan bahan bakar fosil

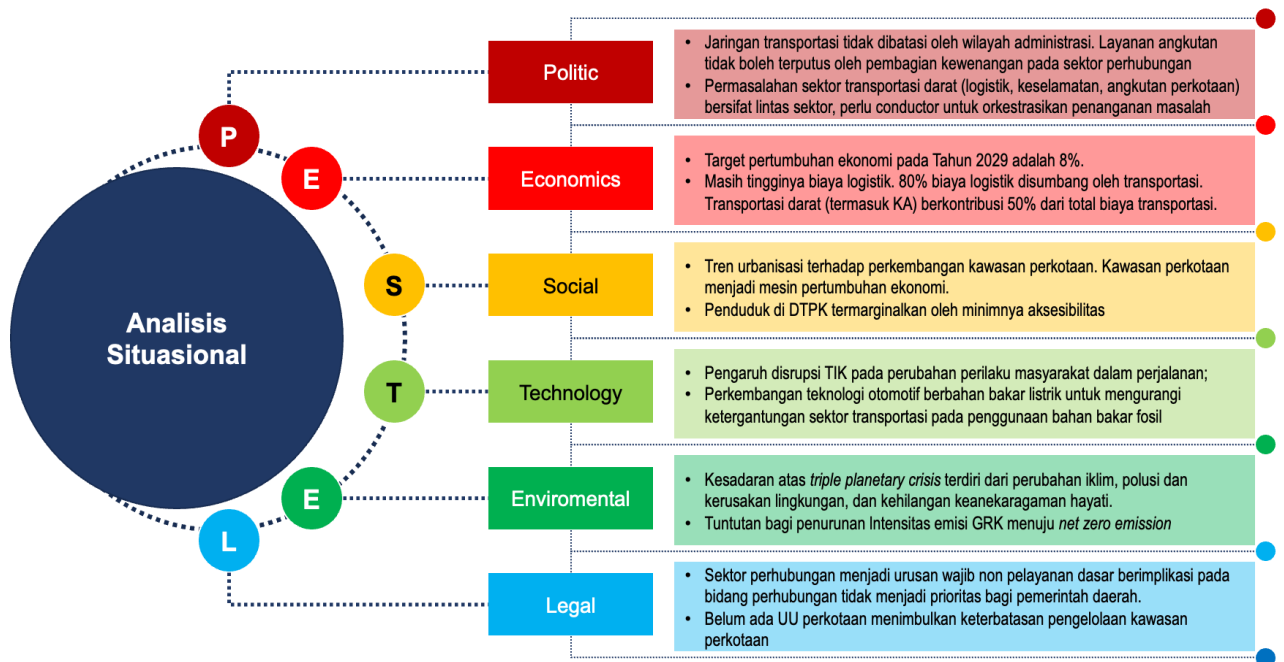
e. Enviromental

1. Kesadaran atas triple planetary crisis terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati; dan Tuntutan bagi penurunan Intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

f. Legal

1. Sektor perhubungan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar berimplikasi pada bidang perhubungan tidak menjadi prioritas bagi pemerintah daerah; dan
2. Belum ada UU perkotaan menimbulkan keterbatasan pengelolaan kawasan perkotaan.

Penjabaran analisis situasional secara ringkas disajikan pada Gambar I.4



Gambar I.4 Analisis Situasional Perhubungan Darat

Analisis tantangan dan peluang untuk menjawab isu strategis dan analisis situasional dari faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja sektor perhubungan darat sebagaimana disajikan pada **Tabel 7** adalah sebagai berikut:

1. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya transportasi adalah sebagai berikut:
  - a. Tantangan untuk meningkatkan kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya transportasi adalah sebagai berikut:
    - Kegiatan logistik bersifat lintas sektor. Penanganan masalah logistik di Indonesia memerlukan *conductor* untuk mengorkestrasikan penanganan logistik yang lintas sektor; dan
    - Waktu tempuh pada lintas utama di Indonesia masih tinggi dibandingkan negara tetangga.
  - b. Peluang untuk meningkatkan kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya transportasi adalah sebagai berikut:
    - Pengembangan konektivitas lintas angkutan barang untuk menghubungkan gateway (pelabuhan dan bandar udara), terminal barang (alih moda dan konsolidasi/distribusi muatan barang), dan hinterland;
    - Peningkatan kelancaran lalu lintas untuk menurunkan waktu tempuh perjalanan lintas utama pulau di Indonesia; dan
    - Peningkatan kontribusi angkutan barang berbasis jalan untuk menurunkan biaya transportasi.
2. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan kontribusi terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut:
  - a. Tantangan untuk meningkatkan kontribusi terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut:
    - Keselamatan LLAJ bersifat lintas sektor. Penanganan keselamatan Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan pendekatan 5 pilar keselamatan.
    - Penetapan kontribusi tiap pilar untuk menurunkan fatalitas korban kecelakaan belum tersedia, sehingga kontribusi perhubungan darat belum dapat diukur secara langsung.
  - b. Peluang untuk meningkatkan kontribusi terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut:
    - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peran penting dalam pelaksanaan RUNK LLAJ sebagai koordinator Pilar 3 maupun instansi penanggung jawab dan pendukung pada Pilar 1, Pilar 2, dan Pilar 4.
    - Peran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat difokuskan pada Pilar 3 (koordinator pilar) dan penanganan pada kejadian

kecelakaan lalu lintas jalan yang fatal dan berulang dengan penyebab yang sama, seperti: kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan angkutan umum (orang atau barang).

3. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan modal share angkutan umum perkotaan adalah sebagai berikut:
  - a. Tantangan untuk meningkatkan modal share angkutan umum perkotaan adalah sebagai berikut:
    - Urbanisasi meningkatkan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal di kawasan perkotaan. Masyarakat memilih tinggal di pinggiran kota, sehingga mendorong perkembangan *sprawl* kawasan perkotaan, yang ditandai oleh pola hunian berkepadatan rendah dan tersebar;
    - Permintaan pergerakan pada kawasan perkotaan dengan kepadatan rendah dan tersebar menyebabkan jaringan satu moda angkutan saja tidak mampu untuk menjangkau seluruh kawasan perkotaan;
    - Kendaraan pribadi dengan pola perjalanan door-to-door menjadi moda yang sesuai digunakan pada kawasan perkotaan yang berkembang secara *sprawl*. Jika kondisi ini dibiarkan, masyarakat menjadi makin tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi.
  - b. Peluang untuk meningkatkan modal share angkutan umum perkotaan adalah sebagai berikut:
    - Penerapan *transport demand management* untuk meningkatkan pengguna angkutan umum massal perkotaan dan menurunkan panjang perjalanan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan;
    - Integrasi antar/intra moda angkutan perkotaan untuk membentuk pengalaman perjalanan tunggal yang door-to-door dan seamless.
4. Tantangan dan peluang untuk menurunkan ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil adalah sebagai berikut:
  - a. Tantangan untuk menurunkan ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil adalah ketergantungan sektor transportasi pada bahan bakar fosil masih tinggi (338,4 juta BOE. Skenario BAU, proyeksi permintaan energi sektor transportasi tumbuh 4,6%/tahun dan meningkat 5 kali lipat pada tahun 2050 dibanding tahun dasar 2016.
  - b. Peluang untuk menurunkan ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil masih terbuka, karena penggunaan kendaraan berbahan bakar gas dan listrik masih kurang dari satu persen.

5. Tantangan dan peluang untuk mendorong daya saing layanan angkutan antar kota untuk meningkatkan konektivitas Wilayah Daratan:
  - a. Tantangan untuk meningkatkan daya saing layanan angkutan antar kota adalah pembangunan jalan tol antar kota mengungkit perjalanan antar kota dengan kendaraan pribadi secara masif;
  - b. Peluang untuk meningkatkan daya saing layanan angkutan antar kota adalah sebagai berikut:
    - Angkutan jalan memiliki peran strategis untuk membangun konektivitas seluruh wilayah daratan dan layanan first/last miles dengan moda angkutan lain; dan
    - Restrukturisasi trayek angkutan AKAP via tol dan non tol untuk meningkatkan daya saing angkutan AKAP.
6. Tantangan dan peluang untuk afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK
  - a. Tantangan untuk afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) adalah Masyarakat di DTPK termarginalkan oleh rendahnya aksesibilitas;
  - b. Peluang untuk afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) adalah sebagai berikut:
    - Angkutan penumpang jalan perintis membuka wilayah untuk mengungkit pemerataan pembangunan. Sementara itu, angkutan barang perintis menjadi layanan first/last miles dari/ke gateway (pelabuhan) dengan hinterland di wilayah kepulauan.
    - Peningkatan jumlah DTPK dilayani oleh angkutan orang dan barang perintis
1. Tantangan dan peluang untuk angkutan penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan
  - a. Tantangan pengembangan angkutan penyeberangan adalah Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan banyak pulau atau kepulauan yang dipisahkan oleh perairan;
  - b. Peluang pengembangan angkutan penyeberangan adalah peran strategis angkutan penyeberangan baik komersial dan perintis sebagai jembatan penghubung dua pulau yang berdekatan dan dipisahkan oleh perairan untuk mengatasi permasalahan konektivitas antar pulau.
2. Tantangan dan peluang untuk penanganan kendaraan barang ODOL

- a. Tantangan penanganan kendaraan barang ODOL adalah sebagai berikut:
    - Penanganan kendaraan barang ODOL bersifat lintas sektor dan kewenangan;
    - Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan hanya pada angkutan barang khusus berbahaya dan tidak berbahaya. Sementara itu, kewenangan angkutan barang umum dijalankan oleh pemerintah daerah.
  - b. Peluang penanganan kendaraan barang ODOL pada tahap awal adalah difokuskan pada pada angkutan barang khusus. Tahap berikutnya, pemerintah daerah didorong untuk terlibat dalam penanganan ODOL untuk angkutan barang umum.
3. Tantangan dan peluang pengembangan actual data LLAJ
- a. Tantangan pengembangan actual data LLAJ adalah masalah transportasi jalan di Indonesia perlu diselesaikan dengan pemanfaatan pangkalan data yang bersifat aktual untuk identifikasi dan analisis permasalahan, membuat keputusan, meningkatkan kualitas respons darurat, dan evaluasi kinerja.
  - b. Peluang pengembangan actual data LLAJ adalah digitalisasi penyelenggaraan LLAJ dengan pengembangan sistem informasi sebagai instrumen perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja transportasi jalan berbasis data yang aktual.

**Tabel 1.5** Tantangan dan Peluang pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

| No | Isu Strategis                                                               | Tantangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peluang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logistik bersifat lintas sektor. Penanganan masalah logistik perlu conductor untuk orkestrasi penanganan logistik;</li> <li>- Waktu tempuh pada lintas utama di Indonesia masih tinggi dibandingkan negara tetangga (Indonesia : 2,2 Jam/100 km, sedangkan rata rata Vietnam dan Thailand mencapai 1,5 Jam/100 km)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan konektivitas lintas angkutan barang untuk menghubungkan gateway (pelabuhan dan bandar udara), terminal barang (alih moda dan konsolidasi/distribusi muatan), dan hinterland;</li> <li>- Peningkatan kelancaran lalu lintas untuk menurunkan waktu tempuh perjalanan pada lintas utama pulau di Indonesia yang bermanfaat untuk menurunkan biaya transportasi</li> </ul> |
| 2  | Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keselamatan LLAJ bersifat lintas sektor. Penanganan keselamatan LLAJ menggunakan pendekatan 5 pilar keselamatan.</li> <li>- Penetapan kontribusi tiap pilar untuk menurunkan fatalitas</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peran penting dalam pelaksanaan RUNK LLAJ sebagai koordinator Pilar 3 maupun instansi penanggung jawab dan pendukung pada Pilar 1, Pilar 2, dan Pilar 4.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |

| No | Isu Strategis                                                        | Tantangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peluang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      | korban kecelakaan belum tersedia, sehingga kontribusi perhubungan darat belum dapat diukur secara langsung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat difokuskan pada Pilar 3 (koordinator pilar) dan penanganan pada kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang fatal dan berulang dengan penyebab yang sama, seperti: kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan angkutan umum (orang atau barang).</li> </ul>                                                                                                         |
| 3  | Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan aglomerasi perkotaan diarahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Wilayah metropolitan di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 44,13 persen dari PDB Indonesia.</li> <li>- Sektor perhubungan darat melalui pengembangan angkutan umum massal perkotaan memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah bagi peningkatan kontribusi wilayah metropolitan terhadap PDB Indonesia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan transport demand management untuk meningkatkan pengguna angkutan umum massal perkotaan dan menurunkan panjang perjalanan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan</li> <li>- Keberhasilan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan pada kawasan perkotaan metropolitan dan prioritas memberikan nilai tambah berupa peningkatan kontribusi kawasan perkotaan terhadap PDB Indonesia</li> </ul> |
| 4  | Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketergantungan sektor transportasi pada bahan bakar fosil masih tinggi, yaitu: 338,4 juta BOE</li> <li>- Pada skenario BAU, proyeksi permintaan energi sektor transportasi tumbuh 4,6%/tahun dan meningkat 5 kali lipat pada tahun 2050 dibanding tahun dasar 2016</li> </ul>                                                                                                                                        | Armada angkutan jalan menggunakan bahan bakar gas dan listrik kurang dari 1% menjadi peluang intervensi kebijakan untuk meningkatkan konversi armada dengan memberikan prioritas pada angkutan umum.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Konektivitas Wilayah Daratan                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan konektivitas antar wilayah daratan untuk melayani pergerakan orang dan barang antar kota yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial;</li> <li>- Pembangunan jalan tol antar kota mengungkit perjalanan antar kota dengan kendaraan pribadi secara masif.</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan jalan menjalankan fungsi <i>servicing</i> untuk fasilitasi pergerakan orang guna membangun konektivitas wilayah daratan dan layanan lanjutan bagi moda angkutan lain.</li> <li>- Restrukturisasi trayek via tol dan non tol untuk meningkatkan daya saing angkutan AKAP.</li> </ul>                                                                                                                     |
| 6  | Afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk | Masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) termarginalkan oleh rendahnya aksesibilitas. Minimnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan jalan menjalankan fungsi promoting untuk membuka aksesibilitas wilayah untuk mengungkit kegiatan ekonomi dan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No | Isu Strategis                                                                                         | Tantangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peluang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | membuka aksesibilitas DTPK                                                                            | aksesibilitas menyebabkan kegiatan ekonomi dan sosial di DTPK pun menjadi terbatas pula.                                                                                                                                                                                                                                              | <p>sosial bagi tercapainya pemerataan pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan layanan angkutan orang dan barang perintis merupakan bentuk pemihakan positif untuk membuka aksesibilitas di lebih banyak DTPK.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 7  | Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan | Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan banyak pulau atau kepulauan yang dipisahkan oleh perairan.                                                                                                                                                                                                                             | Angkutan penyeberangan memiliki peran strategis sebagai jembatan penghubung dua pulau yang berdekatan dan dipisahkan oleh perairan untuk mengatasi permasalahan konektivitas antar pulau.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | Kendaraan Barang ODOL                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan kendaraan barang ODOL bersifat lintas sektor dan kewenangan;</li> <li>- Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan hanya pada angkutan barang khusus berbahaya dan tidak berbahaya. Sementara itu, kewenangan angkutan barang umum dijalankan oleh pemerintah daerah.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahap awal, penanganan ODOL difokuskan pada angkutan barang khusus. Tahap berikutnya, pemerintah daerah didorong untuk terlibat dalam penanganan ODOL untuk angkutan barang umum.</li> <li>- Integrasi penanganan ODOL berbasis digital antara uji berkala, pengawasan muatan dan operasional angkutan, serta penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan perilaku ODOL.</li> </ul> |
| 9  | Kebutuhan Actual Data                                                                                 | Analisis masalah, perumusan kebijakan, dan evaluasi kinerja transportasi jalan belum berbasis data aktual untuk menemukan akar masalah transportasi jalan di Indonesia. Penanganan masalah transportasi kurang tepat sasaran karena fokus pada simptom masalah.                                                                       | Digitalisasi penyelenggaraan LLAJ dengan pengembangan sistem informasi sebagai instrumen perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja transportasi jalan berbasis data yang aktual                                                                                                                                                                                                                                     |

## **BAB 2**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **2.1 Visi**

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden Republik Indonesia 2025-2029. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

#### **“Transportasi Darat Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Adapun pengertian atas sejumlah kata kunci dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 adalah:

- *Transportasi darat* mencakup penyelenggaraan pelayanan bidang lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- *Pelayanan transportasi darat yang handal* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang konektivitas tinggi (*well connected*), aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- *Pelayanan transportasi darat yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan (*sustainability*), dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif; dan
- *Pelayanan transportasi darat yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan

distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Selanjutnya dengan didasarkan pada Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029 dan penjabaran visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disampaikan guna menjalankan dan mendukung hal tersebut, maka Visi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta adalah sebagai berikut:

**VISI Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta 2025-2029  
“Transportasi Darat D.I.Yogyakarta Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

**2.1.2 Misi**

Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta 2025-2029 diturunkan dari Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan di D.I.Yogyakarta;
- b. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru di D.I.Yogyakarta;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman di D.I.Yogyakarta;
- d. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan di D.I.Yogyakarta;
- e. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama di D.I.Yogyakarta;
- f. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau di D.I.Yogyakarta;
- g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat di D.I.Yogyakarta;
- h. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim di D.I.Yogyakarta.

## 2.2 Tujuan

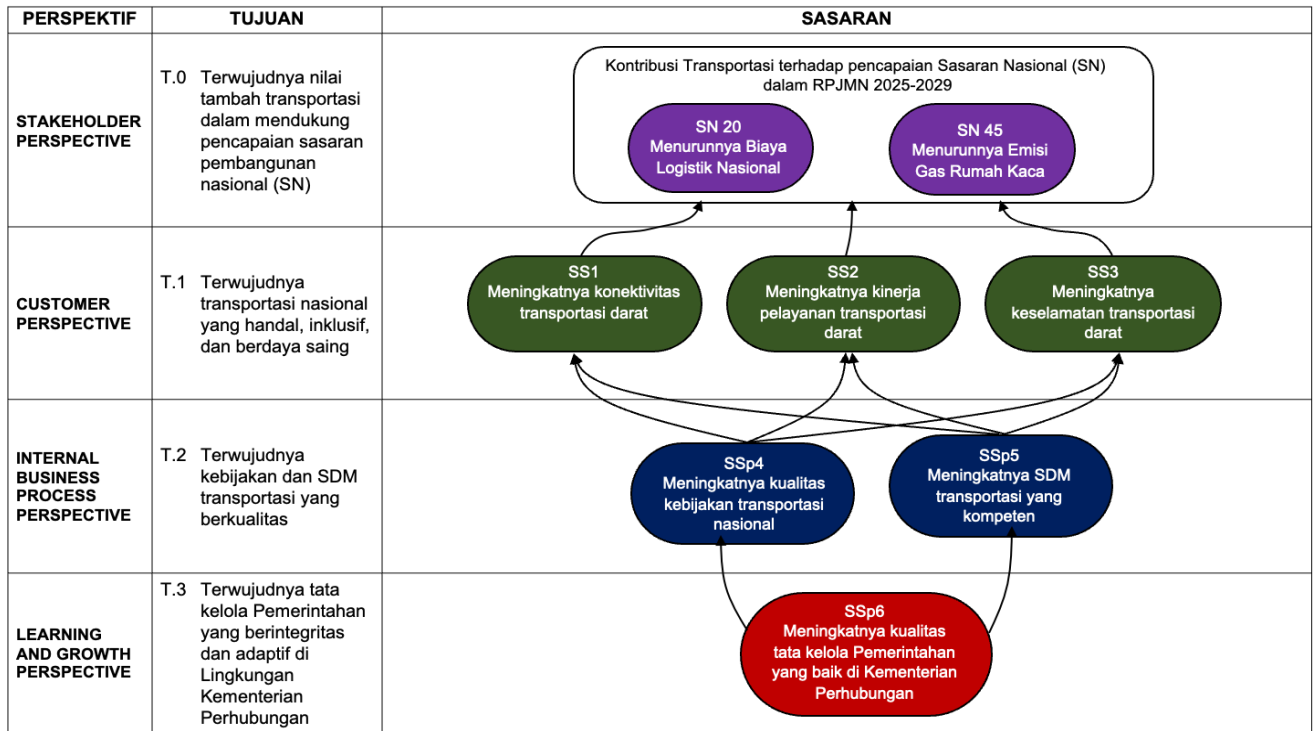
Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional merupakan sasaran pada periode jangka menengah 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan *balanced scorecard* atau BSC. Penggunaan *balanced scorecard* mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Pendekatan *balanced scorecard* membagi proses kerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke dalam 4 (empat) perspektif sebagaimana disajikan pada **Gambar II.6** adalah sebagai berikut:

- a. *Stakeholders Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan pemangku kepentingan pada bidang perhubungan darat berupa manfaat atau dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan mendukung Visi Indonesia 2045;
- b. *Customer Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan pengguna layanan transportasi darat berupa hasil atau outcome dari penyelenggaraan *transportasi* darat sesuai lingkup tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, yaitu: konektivitas dan layanan transportasi darat yang berkualitas dan berkeselamatan;
- c. *Internal Business Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan internal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam proses *penyelenggaraan* pemerintahan di bidang perhubungan darat yang diwujudkan melalui perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan infrastruktur transportasi (sarana, dan prasarana) maupun pengembangan SDM sektor transportasi darat yang berkualitas;
- d. *Learning and Growth Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan internal Direktorat Perhubungan Darat dalam penyediaan input/masukan bagi jalannya organisasi berupa penyediaan SDM internal, pendanaan, pengelolaan data dan informasi, perlengkapan kerja, regulasi, organisasi dan tata *kerja* yang dikelola sesuai prinsip *good governance*.

**“Transportasi Darat Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

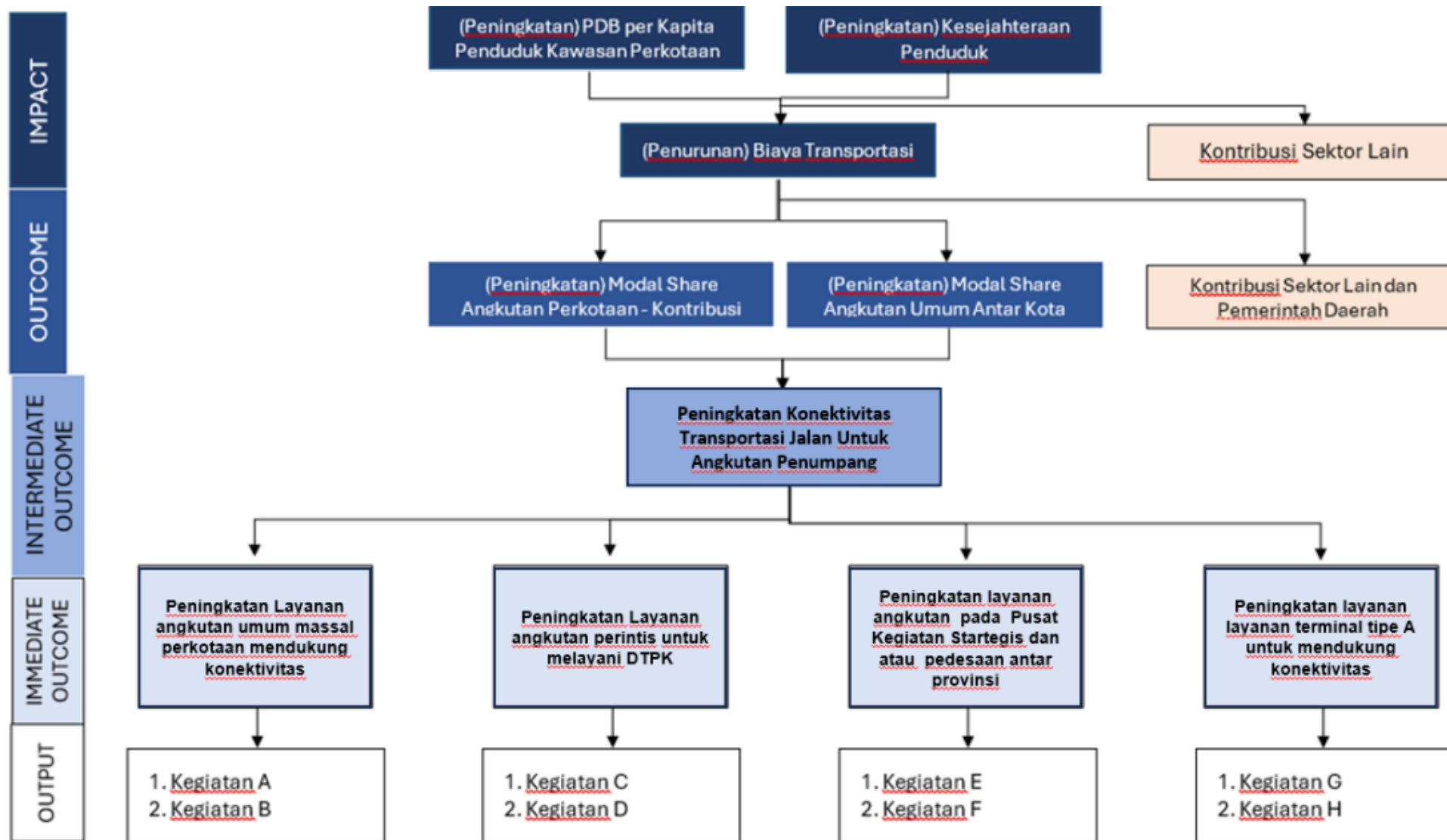


**Gambar II.6** Transportasi Darat Maju Menuju Indonesia Emas 2045

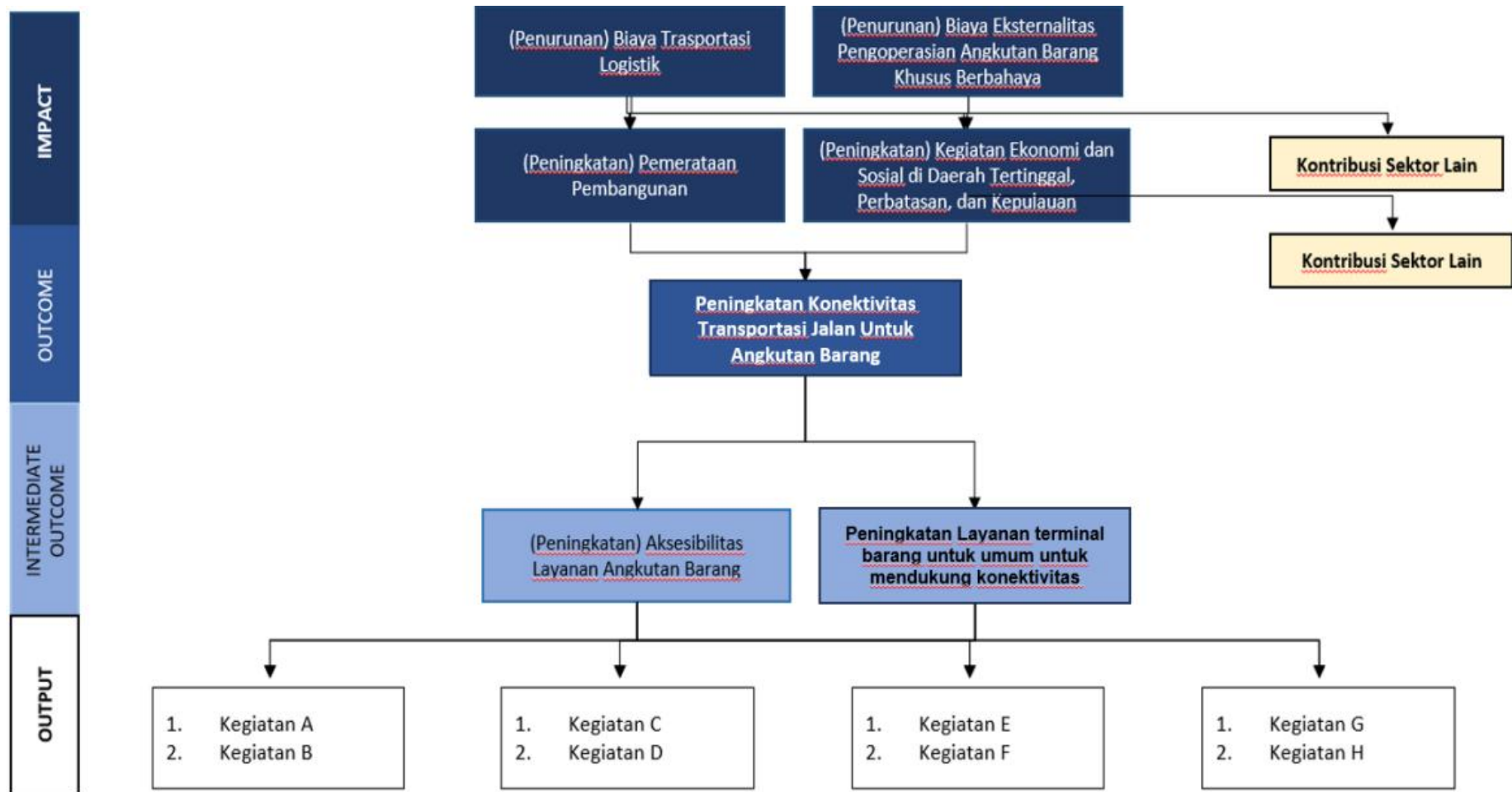
**Tabel II.1 Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029**

| PERSPEKTIF                                                   |     | TUJUAN                                                                                                              |       | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAKEHOLDER PERSPECTIVE<br>(Externalities)                   | T.0 | Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 |       | Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029) |        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)</li> <li>2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan (kumulatif)</li> <li>3. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan</li> <li>4. Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani</li> <li>5. Terminal Penumpang yang Beroperasi</li> <li>6. Pelabuhan Penyeberangan yang Beroperasi</li> <li>7. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan</li> <li>8. Volume Angkutan Penyeberangan</li> </ol>                                                                                                                                         |
| CUSTOMER PERSPECTIVE<br>(Core Business)                      | T.1 | Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing                                             | IKT.1 | Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi darat                                              | %      | <p>Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Darat (<math>CKL_{TD}</math>)</p> $CKL_{TD} = (RRK_{TD}/TRK_{TD} + RIKM_{TD}/TIKM_{TD} + RTK_{TJ}/TTK_{TJ})/3$ <p> <math>RRK_{TD}</math> = Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Darat<br/> <math>TRK_{TD}</math> = Target Rasio Konektivitas Transportasi Darat<br/> <math>RIKM_{TD}</math> = Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat<br/> <math>TIKM_{TD}</math> = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat<br/> <math>RTK_{TJ}</math> = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan<br/> <math>TTK_{TJ}</math> = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan </p> |
| INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE<br>(Technical Support) | T.2 | Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas                                                         | IKT.2 | Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi                  | %      | Diukur pada Badan Kebijakan Transportasi dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, tetapi Ditjen Perhubungan Darat menyumbang kegiatan mendukung pencapaian Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

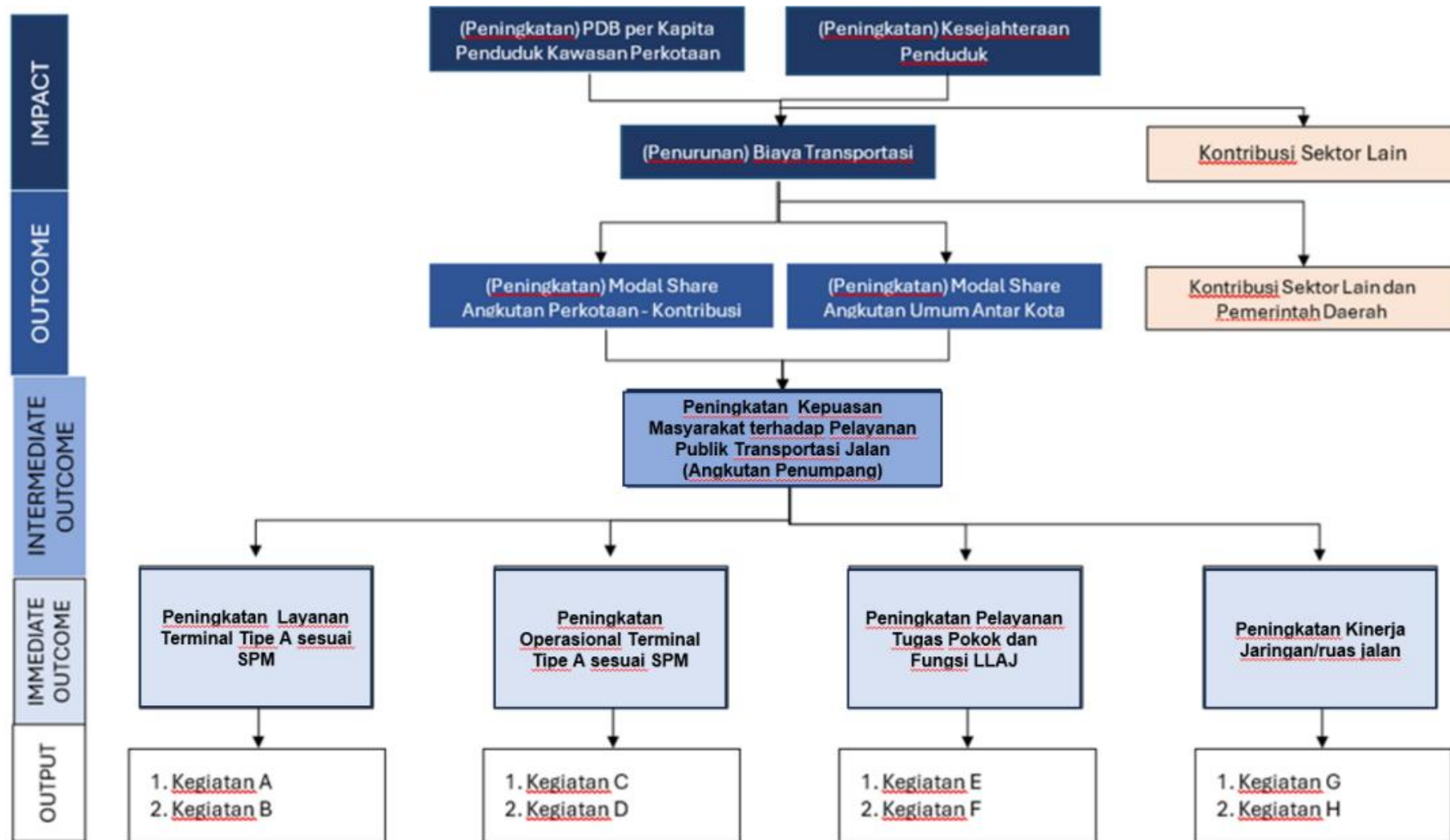
| PERSPEKTIF                                                       |     | TUJUAN                                                                                                    |       | INDIKATOR                                                        | SATUAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE<br>( <i>Management Support</i> ) | T.3 | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan | IKT.3 | Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan | %      | <p>Capaian Kineja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (<math>CKRB_{KP}</math>)</p> <p><b><math>CKRB_{KP} = (RIRB_{KP}/TIRB_{KP})</math></b></p> <p><math>RIRB_{KP}</math> = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan<br/> <math>TIRB_{KP}</math> = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan</p> |



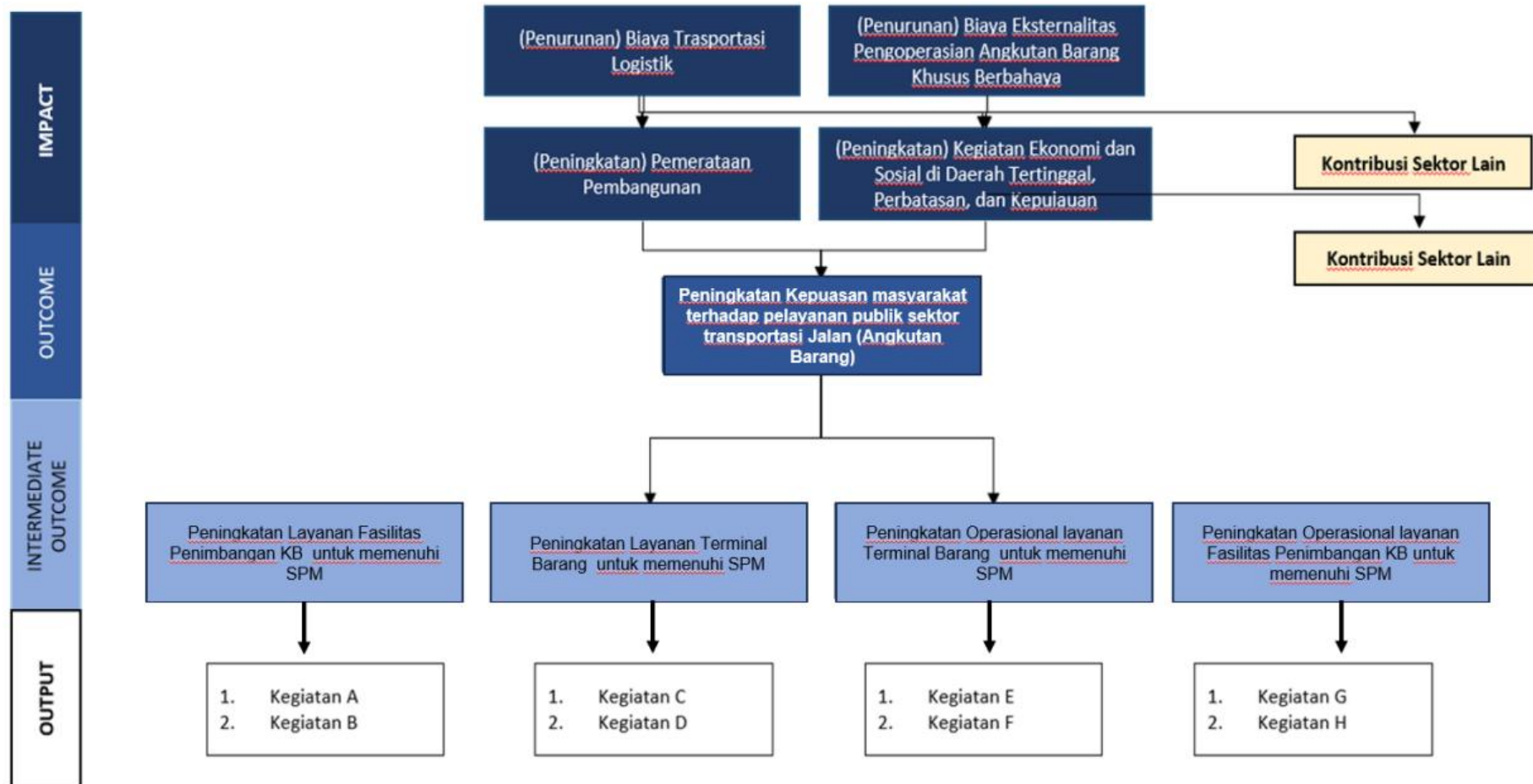
**Gambar II.7** Casecading Indikator Konektivitas Angkutan Penumpang



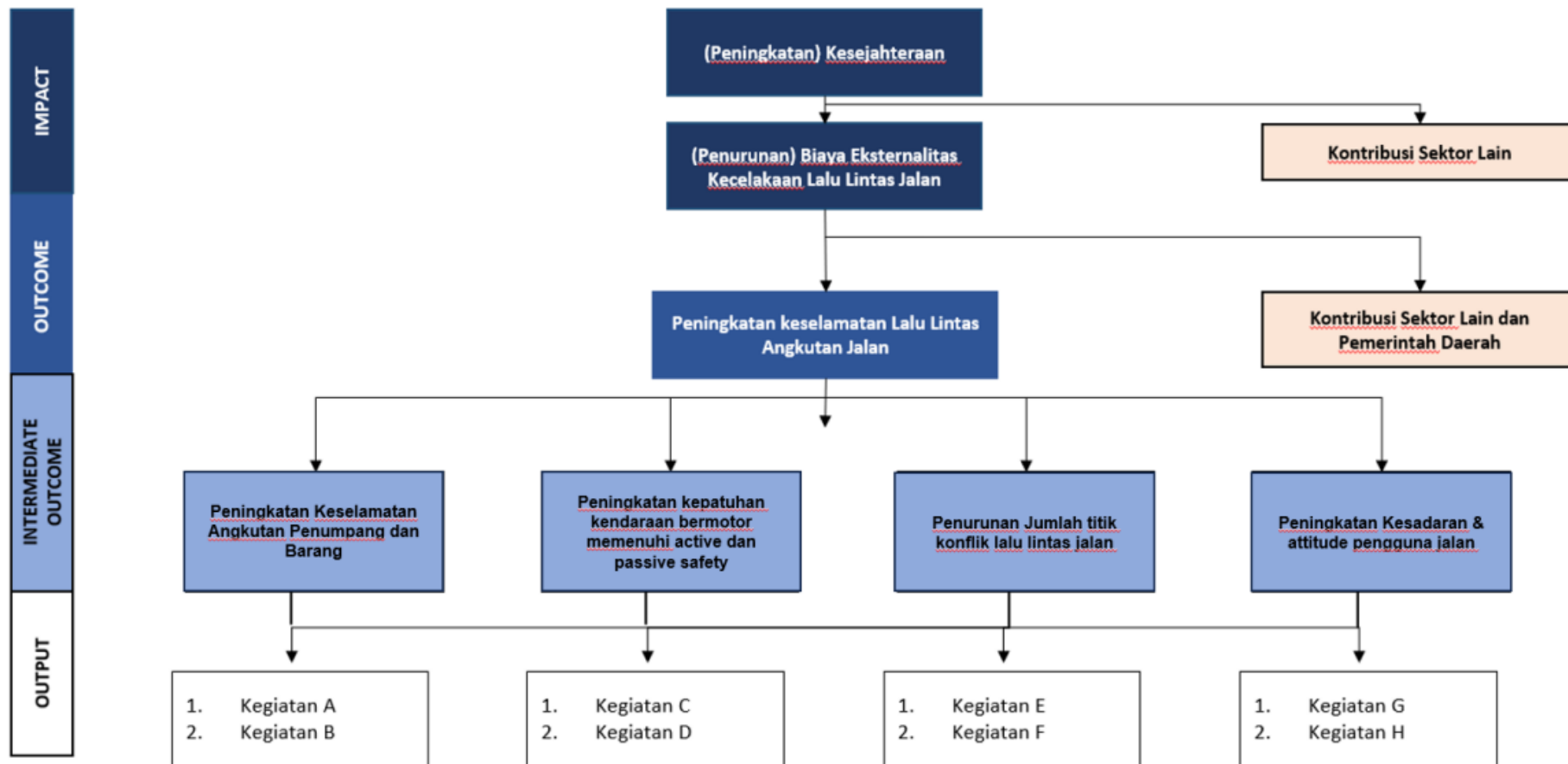
**Gambar II.8** Casecading Indikator Konektivitas Angkutan Barang



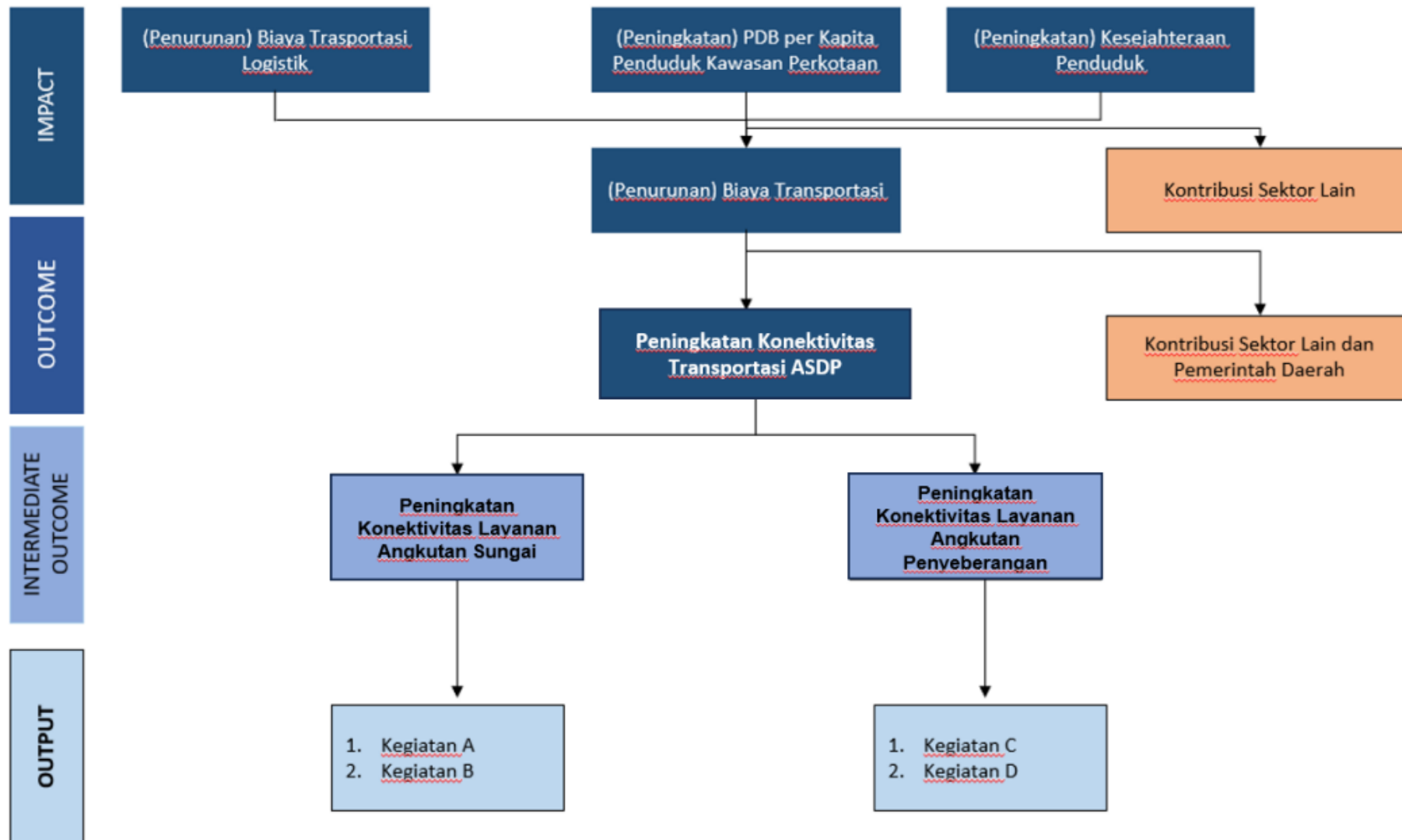
Gambar II.9 Casecading Indikator Pelayanan Angkutan Penumpang



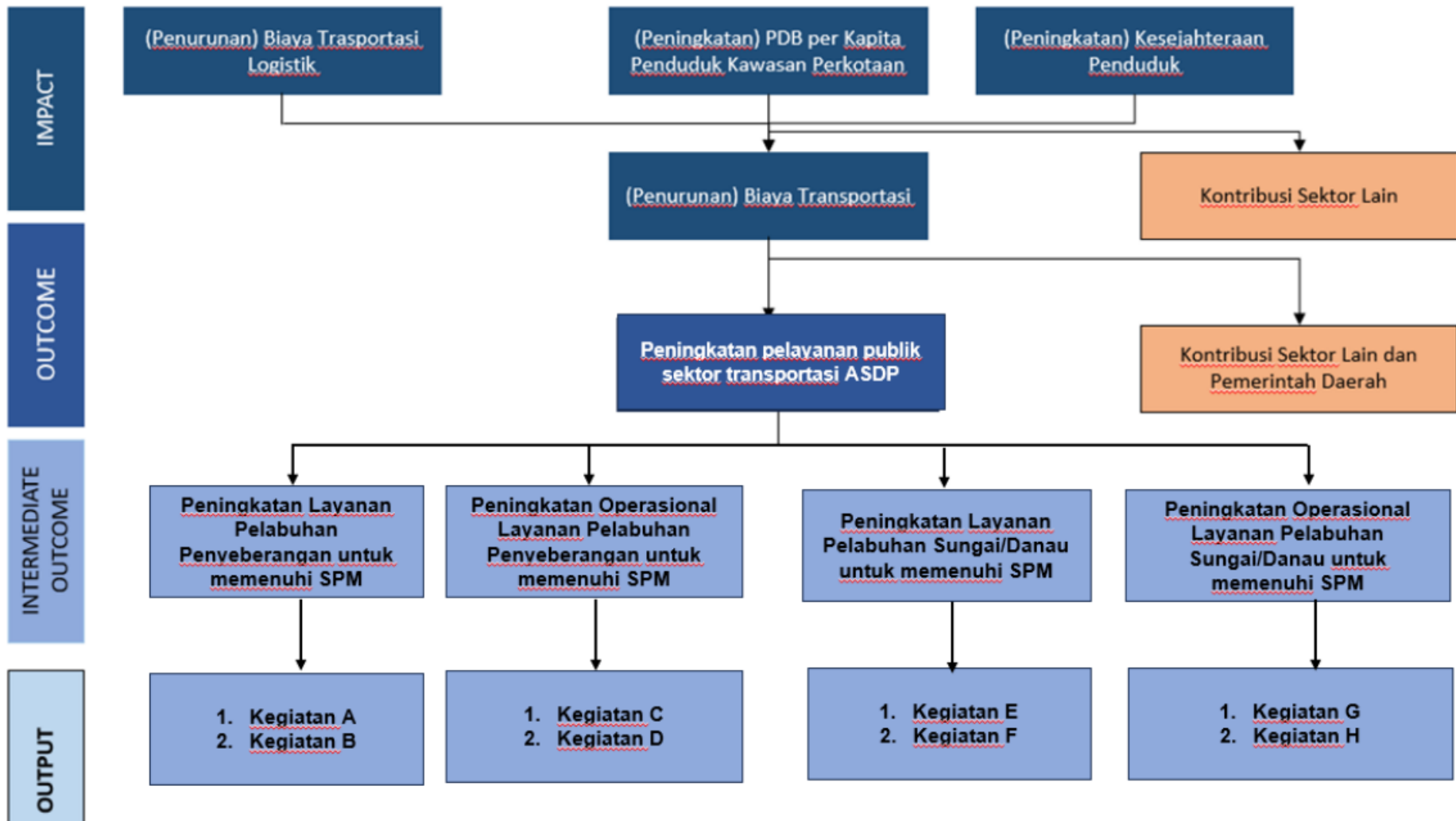
**Gambar II.10** Casecading Indikator Pelayanan Angkutan Barang



Gambar II.11 Casecading Indikator Keselamatan LLAJ



**Gambar II.12** Casecading Indikator Konektivitas Transportasi ASDP



Gambar II.12 Casecading Indikator Pelayanan Transportasi ASDP

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan *balanced scorecard* adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya nilai tambah transportasi darat untuk mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045

Tujuan ini menjawab *stakeholder perspective* agar penyelenggaraan bidang perhubungan darat mampu memberikan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai berikut:

- 1) Dukungan bidang transportasi darat bagi peningkatan nilai tambah ekonomi adalah sebagai berikut:
  - a) Perbaikan kinerja transportasi barang berbasis jalan memberikan manfaat ekonomi berupa penurunan biaya transportasi logistik;
  - b) Peningkatan konektivitas bidang transportasi jalan memberikan kontribusi manfaat berupa peningkatan stok infrastruktur;
  - c) Pengembangan angkutan umum massal perkotaan memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan kontribusi kawasan perkotaan terhadap PDB Indonesia;
  - d) Penyediaan layanan angkutan perintis orang dan barang memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
- 2) Dukungan bidang transportasi darat bagi peningkatan nilai tambah sosial adalah sebagai berikut:
  - a) Peningkatan kontribusi perhubungan darat untuk menurunkan jumlah kejadian kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas memberikan manfaat sosial berupa penurunan biaya yang ditanggung korban dan keluarga korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan;
  - b) Pengembangan angkutan umum massal perkotaan memberikan manfaat sosial berupa penurunan biaya transportasi yang ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan.
  - c) Dukungan bidang transportasi darat bagi peningkatan nilai tambah lingkungan adalah penurunan emisi GRK yang dihasilkan oleh kegiatan transportasi darat.
- 3) Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing

Merupakan tujuan untuk menjawab *customer perspectives* agar penyelenggaraan transportasi darat mampu memberikan layanan yang handal, inklusif, dan berdaya saing mencakup aspek:

- a) Konektivitas yang Handal

Bidang perhubungan darat mengampu moda angkutan jalan dan penyeberangan. Kedua moda ini memiliki peran strategis untuk membangun konektivitas wilayah daratan dan antar pulau di Indonesia. Peran bidang perhubungan darat ini diarahkan untuk menjalankan fungsi *servicing* atau *ship*

*follows the trade* untuk fasilitasi pergerakan orang dan/atau barang dan *promoting* atau *ship promotes the trade* untuk membuka aksesibilitas wilayah. Moda angkutan jalan memiliki karakteristik untuk melayani pergerakan dari pintu-ke-pintu. Sebaliknya, karakteristik moda angkutan lain adalah melayani pergerakan dari simpul-ke-simpul. Karakteristik ini memberikan peran strategis bagi moda jalan untuk menghubungkan seluruh wilayah daratan dan menjadi layanan lanjutan bagi moda angkutan lain. Sementara itu, karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan mengungkit peran strategis angkutan penyeberangan untuk menyatukan pulau-pulau terdekat yang dipisahkan oleh perairan.

Pengembangan konektivitas transportasi darat dengan memperhatikan peran strategis moda jalan dan penyeberangan diarahkan untuk melayani dan mengungkit perjalanan pada 5 (lima) lokus, yaitu: angkutan perkotaan, angkutan antar kota, angkutan barang, angkutan perintis orang dan barang, serta angkutan penyeberangan. Pengembangan jaringan trayek/lintas untuk menghubungkan antar pusat kegiatan, antara pusat produksi, distribusi, dan konsumsi, antar pulau, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang didukung oleh layanan angkutan yang handal untuk memenuhi kebutuhan perjalanan orang perkotaan dan antar kota, mendukung penurunan biaya transportasi barang, dan mendukung pemerataan pembangunan.

b) Aksesibilitas yang inklusif

Penyediaan layanan transportasi jalan diarahkan untuk melayani kebutuhan beragam. Layanan transportasi memperhatikan kebutuhan dari kelompok masyarakat dengan keterbatasan fisik (difabel dan lanjut usia), ekonomi, maupun gender (wanita dan ibu hamil/menyusui).

Peningkatan aksesibilitas juga ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang termarginalkan oleh minimnya aksesibilitas wilayah. Afirmasi penyediaan angkutan perintis untuk membuka aksesibilitas wilayah diharapkan mengungkit kegiatan ekonomi dan sosial.

c) Layanan transportasi darat yang berkualitas dan berdaya saing

Guna meningkatkan daya saing transportasi darat, penyediaan layanan transportasi darat perlu memperhatikan kebutuhan perjalanan, baik kualitas dan kuantitas layanan. Layanan angkutan darat memiliki kualitas prima yang mencakup kehandalan, kenyamanan, terjangkau, dan tepat waktu. Selain itu, penyediaan layanan angkutan darat secara kuantitas memperhatikan kebutuhan perjalanan dan kenyamanan pengguna layanan.

d) Keselamatan transportasi darat

- Masih tingginya jumlah kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan menjadi tantangan utama bidang transportasi darat.

Penanganan masalah kecelakaan lalu lintas dalam RUNK LLAJ menggunakan pendekatan lima pilar keselamatan LLAJ.

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peran penting dalam pelaksanaan RUNK LLAJ sebagai koordinator Pilar 3 (Kendaraan yang Berkeselamatan) maupun instansi penanggung jawab dan pendukung pada Pilar 1 (Sistem yang Berkeselamatan), Pilar 2 (Jalan yang Berkeselamatan), dan Pilar 4 (Pengguna Jalan yang Berkeselamatan). Pelaksanaan peran di atas diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bagi penurunan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Lokus penyelenggaraan transportasi darat untuk mendukung terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan;
- Penyelenggaraan Angkutan Antar Kota;
- Penyelenggaraan Angkutan Barang;
- Penyelenggaraan Angkutan Perintis Orang dan Barang;
- Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
- Peningkatan Keselamatan dan Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- e) Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas (T.3) merupakan tujuan pada level internal business

Tujuan ini berkaitan dengan proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang perhubungan darat untuk mengembangkan konektivitas dan layanan transportasi darat.

Pemenuhan perspektif internal business perlu difokuskan pada pelaksanaan peran dalam penyusunan rencana induk dan pelaksanaan program/kegiatan yang lintas direktorat yang didukung oleh SDM internal perhubungan darat yang kompeten. Salah satu rencana induk yang lintas direktorat adalah Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RIJ LLAJ. RIJ LLAJ menjadi salah satu amanat UU No.22 Tahun 2009 yang penting dan mendesak untuk diundangkan dan menjadi acuan bagi perencanaan pada bidang angkutan jalan.

- f) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif (T.4) merupakan tujuan pada level learning and growth

Tujuan ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar mampu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan transportasi secara efektif. Sumber daya yang menjadi input bagi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Perhubungan mencakup penyediaan pendanaan, kelembagaan dan SDM

aparatur, regulasi, sistem informasi dan teknologi, serta sarana bantu kerja yang memadai.

Pengembangan sistem informasi layanan perhubungan darat menjadi isu strategis pada bidang perhubungan darat. Digitalisasi penyelenggaraan LLAJ dilakukan dengan pengembangan sistem informasi sebagai instrumen perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja transportasi jalan berbasis data yang aktual.

### **2.2.1 Sasaran**

#### **1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**

Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

1. SP1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat;
2. SP2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat;
3. SP3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;

Tabel II.5 menyajikan tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029. Sementara itu, sasaran dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat disajikan pada Tabel II.6

Tabel II.5 Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

| Tujuan                                                                                                                       | Sasaran Program                                               | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.1 Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing                                                  | SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat             | Konektivitas transportasi darat mengacu pada perbaikan dan perluasan jaringan transportasi jalan raya dan ASDP serta sistem pendukung lainnya yang memungkinkan pergerakan orang dan barang antarwilayah menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi                                                                                                            | 1. IKP1.1. Ratio Konektivitas transportasi Jalan<br>2. IKP1.2 Ratio Konektivitas transportasi ASDP                                                                                    |
|                                                                                                                              | SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat        | kinerja pelayanan transportasi darat merujuk pada perbaikan kualitas, efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu layanan transportasi jalan raya dan ASDP yang digunakan oleh masyarakat umum maupun sektor logistik. Kinerja ini mencerminkan sejauh mana sistem transportasi darat mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal dan berkelanjutan. | 1. IKP 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Jalan<br>2. IKP 2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi ASDP |
|                                                                                                                              | SP.3 Meningkatnya keselamatan transportasi darat              | Keselamatan lalu lintas angkutan jalan merujuk pada upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap manusia, kendaraan, dan infrastruktur                                                                                                                                              | IKP 3 : Persentase Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan                                                                                                                 |
| T.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. | SPp6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik | Mengukur sejauh mana Kementerian Perhubungan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sektor transportasi, yang tercermin melalui berbagai instrumen evaluasi internal dan eksternal.                                                                            | IKP 4 : Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub                                                                                                                                           |

**1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta**

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

SP1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat;

SP2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat;

SP3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan;

SP4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat

Tabel 2.4 menyajikan sasaran program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta 2025-2029. Sementara itu, sasaran dan indikator kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta disajikan pada Tabel.

| Tujuan                                                                      | Sasaran Program                                        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.1 Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing | SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 1.1.3 Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN &amp; KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi;</li> <li>• SK 1.1.4 Meningkatnya Konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang</li> </ul>                                         | Konektivitas transportasi darat mengacu pada perbaikan dan perluasan jaringan transportasi jalan raya dan ASDP serta sistem pendukung lainnya yang memungkinkan pergerakan orang dan barang antarwilayah menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKK 1.1.3 Jumlah Layanan angkutan Antarmoda wilayah KSPN;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             | SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 2.1 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | kinerja pelayanan transportasi darat merujuk pada perbaikan kualitas, efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu layanan transportasi jalan raya dan ASDP yang digunakan oleh masyarakat umum maupun sektor logistik. Kinerja ini mencerminkan sejauh mana sistem transportasi darat mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal dan berkelanjutan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKK 2.1.1 Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM;</li> <li>• IKK 2.1.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM;</li> <li>• IKK 2.1.5 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM;</li> <li>• IKK 2.1.6 Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ;</li> <li>• IKK 2.1.7 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ.</li> </ul> |
|                                                                             | SP.3 Meningkatnya keselamatan transportasi darat       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang;</li> <li>• SK 3.2 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety;</li> <li>• SK 3.3 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan;</li> <li>• SK 3.4 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang</li> </ul> | Keselamatan lalu lintas angkutan jalan merujuk pada upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap manusia, kendaraan, dan infrastruktur                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKK 3.1.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata;</li> <li>• IKK 3.1.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang;</li> <li>• IKK 3.1.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan;</li> <li>• IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman;</li> </ul>                                                    |

| Tujuan                                                                                                                       | Sasaran Program                                               | Sasaran Kegiatan                                                                                            | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB;</li> <li>• IKK 3.2.3 Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi;</li> <li>• IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis;</li> <li>• IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman;</li> <li>• IKK 3.4.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman;</li> <li>• IKK 3.4.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda</li> </ul>                                                                                       |
| T.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. | SPp6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 4Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perhubungan Darat.</li> </ul> | Indeks Ditjen<br>Mengukur sejauh mana Kementerian Perhubungan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sektor transportasi, yang tercermin melalui berbagai instrumen evaluasi internal dan eksternal. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKK 4.1 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada D.I.Yogyakarta;</li> <li>• IKK 4.2 Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP);</li> <li>• IKK 4.3 Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran;</li> <li>• IKK 4.4 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor);</li> <li>• IKK 4.5 Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses);</li> <li>• IKK 4.6 Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan;</li> <li>• IKK 4.7 Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR);</li> <li>• IKK 4.8 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat;</li> </ul> |

| Tujuan | Sasaran Program | Sasaran Kegiatan | Penjelasan | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                 |                  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKK 4.9 Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat;</li> <li>• IKK 4.10 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat.</li> </ul> |

**Tabel 2.1** Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan

| NO. | SASARAN KEGIATAN |                                                                  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                               | SATUAN   | BASELINE<br>2024 | TARGE<br>T 2025 | TARGE<br>T 2026 | TARGE<br>T 2027 | TARGE<br>T 2028 | TARGE<br>T 2029 |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2)              |                                                                  | (3)                        |                                                                                               | (4)      | (5)              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.  | SK<br>1.1.1      | Meningkatnya<br>konektivitas jaringan<br>transportasi DTPK       | IKK<br>1.1.1.A             | Jumlah Layanan Subsidi<br>Transportasi Angkutan<br>Jalan                                      | Trayek   | 9                | 9               | 13              | 13              | 13              | 13              |
|     |                  |                                                                  | IKK 1.1.4                  | Jumlah terminal Barang<br>yang dibangun dan<br>beroperasi untuk<br>mendukung konektivitas     | Unit     | -                | -               | -               | -               | 1               | -               |
| 2.  | SK 2.1           | Meningkatnya<br>pelayanan publik<br>sektor transportasi<br>Jalan | IKK 2.1.1                  | Jumlah terminal tipe A yang<br>ditingkatkan pelayanannya<br>untuk memenuhi SPM                | Unit     | -                | 1               | 1               | 4               | -               | -               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.2                  | Jumlah operasional layanan<br>terminal tipe A sesuai SPM                                      | Unit     | 4                | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.3                  | Jumlah Fasilitas<br>Penimbangan KB yang<br>ditingkatkan pelayanannya<br>untuk memenuhi SPM    | Unit     | -                | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.5                  | Jumlah operasional layanan<br>Fasilitas Penimbangan KB<br>sesuai SPM                          | Unit     | 4                | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.6                  | Jumlah Monitoring Evaluasi<br>terkait Peningkatan<br>Pelayanan Tugas Pokok dan<br>Fungsi LLAJ | Kegiatan | -                | 6               | 6               | 6               | 6               | 6               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.7                  | Penyusunan<br>Dokumen Teknis<br>terkait TUSI                                                  | Dokumen  | -                | 2               | 0               | 2               | 0               | 0               |

|    |        |                                                        |           |                                                                                      |          |   |   |   |   |   |   |
|----|--------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 3. | SK 2.2 | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP | IKK 2.2.7 | Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP | Kegiatan | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|----|--------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|

| NO. | SASARAN KEGIATAN |                                                                              | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                         | SATUAN   | BASELINE 2024 | TARGE T 2025 | TARGE T 2026 | TARGE T 2027 | TARGE T 2028 | TARGE T 2029 |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2)              |                                                                              | (3)                        |                                                                                         | (4)      | (5)           |              |              |              |              |              |
| 4.  | SK 3.1           | Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang                       | IKK 3.1.1                  | Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di D.I.Yogyakarta     | Kegiatan | -             | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 5.  | SK 3.2           | Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety | IKK 3.2.1                  | Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman        | Laporan  | 12            | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           |
|     |                  |                                                                              | IKK 3.2.2                  | Jumlah alat uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB                                        | Kegiatan | 1             | 2            | 3            | 3            | 3            | 3            |
|     |                  |                                                                              | IKK 3.2.3                  | Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi                                       | Kegiatan | -             | -            | -            | 1            | 1            | 1            |
|     | SK 3.3           | Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan                            | IKK 3.3.1                  | Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis                | %        | 100           | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|     |                  |                                                                              | IKK 3.3.2                  | Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman                   | Lokasi   | -             | 5            | 6            | 5            | 6            | 8            |
|     |                  |                                                                              | IKK 3.3.3                  | Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman | Lokasi   | -             | -            | 11           | 16           | 2            | 16           |

|   |        |                                                                 |           |                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | SK 3.4 | Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan | IKK 3.4.1 | Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman                                                                             | Orang | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
|   |        |                                                                 | IKK 3.4.2 | Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda | Orang | -     | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |

| NO. | SASARAN KEGIATAN |                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                        | SATUAN   | BASELINE 2024 | TARGE T 2025 | TARGE T 2026 | TARGE T 2027 | TARGE T 2028 | TARGE T 2029 |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2)              |                                                                         | (3)                        |                                                                                                        | (4)      | (5)           |              |              |              |              |              |
| 7   | SK 4             | Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi<br><br>Ditjen Perhubungan Darat | IKK 4.1                    | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)                                  | Kegiatan | -             | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
|     |                  |                                                                         | IKK4.2                     | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)                                                   | Nilai    | -             | 84,46        | 84,47        | 84,48        | 84,49        | 85           |
|     |                  |                                                                         | IKK4.3                     | Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)                                       | Nilai    | -             | 90           | 91           | 92           | 93           | 94           |
|     |                  |                                                                         | IKK4.4                     | Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) | %        | -             | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|     |                  |                                                                         | IKK4.6                     | Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)              | Nilai    | -             | 90           | 90           | 90           | 90           | 90           |
|     |                  |                                                                         | IKK4.7                     | Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | Kegiatan | -             | 2            | 3            | 5            | 5            | 5            |
|     |                  |                                                                         | IKK4.8                     | Kegiatan Terkait Sistem                                                                                | Kegiatan | -             | 2            | 3            | 3            | 3            | 3            |

|  |  |                                              |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | Merit SDM Ditjen<br>Perhubungan Darat (Skor) |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Tabel 2.2** Manual Perhitungan Indikator Kegiatan

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                            |                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                            |                                                    |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                            |                                                    |      |
| KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                            |                                                    |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                    |      |
| SK1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK | IKK 1.1                    | Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                            |                                                    |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                            |                                                    |      |
| Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan adalah Jumlah layanan angkutan jalan yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah D.I.Yogyakarta yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Trayek Subsidi Angkutan Perintis Jalan serta ditetapkan dalam DIPA BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta. |                                                      |                            |                                                    |      |
| Dihitung berdasarkan Jumlah realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                            |                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                            |                                                    |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                            |                                                    |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Direktorat Angkutan Jalan</li><li>• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>• Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan SDP</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                            |                                                    |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                            |                                                    |      |
| $IKK\ 1.1 = \sum \text{realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                            |                                                    |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                            |                                                    |      |
| Trayek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                            |                                                    |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                            |                                                    |      |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                 | 2027                       | 2028                                               | 2029 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                   | 13                         | 13                                                 | 13   |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                            |                                                    |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan<br>Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan SDP                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                            |                                                    |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                             |      |
| SK1.2                                                                                                                                                                                                                  | Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau |      | IKK 1.2                    | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas |      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah Jumlah terbangun dan beroperasinya Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan.        |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| Dihitung berdasarkan Jumlah realisasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau dalam satu tahun anggaran.                                                                                                                |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan</li><li>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>Seksi Prasarana SDP</li></ul> |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| IKK 1.2 = $\sum$ realisasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau dalam satu tahun anggaran                                                                                                                            |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| Lokasi                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2025                                                                            | 2026 | 2027                       | 2028                                                                                        | 2029 |
|                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                               | -    | -                          | -                                                                                           | -    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Seksi Prasarana                                                                                                                                          |                                                                                 |      |                            |                                                                                             |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                          |      |
| SK 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan |      | IKK 2.1.1                  | Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| <p>Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan sehingga dalam rangka meningkatnya pelayanan publik sektor jalan agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe A, penting untuk meningkatkan fasilitas – fasilitas baik yang utama maupun penunjang yang ada di Terminal Tipe A melalui kegiatan peningkatan, rehabilitasi, perawatan, beautifikasi, serta pengembangan sistem layanan informasi terminal.</p> <p>Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM adalah Jumlah Terminal Tipe A yang telah ditingkatkan, direhabilitasi, diperbaiki, dan telah dilaksanakan penambahan fasilitas penunjang serta dikembangkan sistem layanan informasinya dan untuk memenuhi pelayanan sesuai SPM.</p> |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan</li><li>• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>• Seksi Prasarana Jalan</li><li>• Satuan Pelayanan Terminal Tipe A</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| $IKK\ 2.1.1 = \sum \text{realisasi Peningkatan, rehabilitasi, beautifikasi, pengadaan fasilitas penunjang dan pengembangan Sistem layanan informasi Terminal Tipe A dalam satu tahun anggaran}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025                                                    | 2026 | 2027                       | 2028                                                                     | 2029 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                       | 1    | 4                          | 0                                                                        | 0    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |      |                            |                                                                          |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Seksi Prasarana Jalan<br>Satuan Pelayanan Terminal Tipe A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |      |                            |                                                                          |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                            |                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                            |                                                       |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                            |                                                       |      |
| KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                            |                                                       |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                       |      |
| SK 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan | IKK 2.1.2                  | Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                            |                                                       |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                            |                                                       |      |
| Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM adalah jumlah terminal tipe A di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menyelenggarakan layanan operasional sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dalam PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan. |                                                         |                            |                                                       |      |
| Terminal dianggap memenuhi SPM jika seluruh komponen layanan wajib (pelayanan, teknis operasi, keselamatan, keamanan, fasilitas, dan pemeliharaan) telah dipenuhi dan diverifikasi.                                                                                                                                                             |                                                         |                            |                                                       |      |
| Terminal tipe A kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.                                                                                     |                                                         |                            |                                                       |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                            |                                                       |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Prasarana Transportasi Jalan</li><li>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>Seksi Prasarana Jalan</li><li>Satuan Pelayanan Terminal Tipe A</li></ul>                                                                                                               |                                                         |                            |                                                       |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                            |                                                       |      |
| IKK 2.1.2 = ∑ realisasi operasional layanan Terminal Penumpang Tipe A yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                            |                                                       |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                            |                                                       |      |
| Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                            |                                                       |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                            |                                                       |      |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                                    | 2027                       | 2028                                                  | 2029 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                       | 4                          | 4                                                     | 4    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                            |                                                       |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Seksi Prasarana Jalan<br>Satuan Pelayanan Terminal Tipe A                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                            |                                                       |      |
| CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                            |                                                       |      |
| Dibutuhkan manual survei SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                            |                                                       |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |           |                            |                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |           |                            |                               |             |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |           |                            |                               |             |
| KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |           |                            |                               |             |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                               |             |
| SK 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan | IKK 2.1.3 | Jumlah Penumpang           | Fasilitas untuk pemenuhan SPM | Perpindahan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |           |                            |                               |             |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |           |                            |                               |             |
| Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan.                                                                                                                                                                                     |                                                         |           |                            |                               |             |
| Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat. |                                                         |           |                            |                               |             |
| Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal penumpang yang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan diperlukan Fasilitas perpindahan penumpang mencakup sarana fisik yang memastikan penumpang dapat berpindah moda dengan aman, nyaman, teratur, dan terjangkau.  |                                                         |           |                            |                               |             |
| Jumlah fasilitas perpindahan penumpang untuk pemenuhan SPM adalah jumlah terbangunnya fasilitas pendukung perpindahan penumpang yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |           |                            |                               |             |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |           |                            |                               |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Prasarana Transportasi Jalan</li><li>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>Seksi Prasarana Jalan</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |                                                         |           |                            |                               |             |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |           |                            |                               |             |
| $IKK\ 2.1.3 = \sum \text{realisasi pembangunan fasilitas perpindahan penumpang dalam tahun berjalan}$                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |           |                            |                               |             |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |           |                            |                               |             |
| Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |           |                            |                               |             |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |           |                            |                               |             |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                    | 2027      | 2028                       | 2029                          |             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                       | -         | -                          | -                             |             |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |           |                            |                               |             |
| Direktorat Prasarana Transportasi Jalan<br>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Seksi Prasarana Jalan                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |           |                            |                               |             |
| CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |           |                            |                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |           |                            |                               |             |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |           |                                                                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                        |      |
| SK 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan | IKK 2.1.4 | Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| <p>Peningkatan layanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan fasilitas jembatan timbang guna mengawasi dan mengendalikan muatan kendaraan angkutan barang di jalan raya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mencegah kelebihan muatan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas bahkan dapat difungsikan sementara untuk membantu pemudik saat diperlukan.</p> <p>Ragam kegiatan untuk meningkatkan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor adalah dengan rehabilitasi, revitalisasi, modernisasi, dan perawatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor serta pengembangan sistem layanan informasi jembatan timbang atau penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM adalah Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang telah direhabilitasi, direvitalisasi, dimodernisasi, dan dirawat fasilitas penimbangan kendaraan bermotor serta dikembangkan sistem layanan informasinya.</p> |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan</li><li>• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>• Seksi Prasarana Jalan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| $IKK\ 2.1.4 = \sum \text{realisasi rehabilitasi, revitalisasi, modernisasi, dan perawatan fasilitas penimbangan serta pengembangan sistem layanan informasi pada jembatan timbang atau penimbangan kendaraan bermotor}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                    | 2027      | 2028                                                                                              | 2029 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                       | 1         | 1                                                                                                 | 1    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |           |                                                                                                   |      |
| Direktorat Prasarana Transportasi Jalan<br>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta<br>Seksi Prasarana Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |           |                                                                                                   |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                            |                                                                                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                      |      |
| SK 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan | IKK 2.1.6                  | Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Lalu Lintas Jalan</li><li>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>Seksi Lalu Lintas Jalan SDP</li></ul>                                                                                         |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| IKK 2.1.6 = Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                                            |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                    | 2027                       | 2028                                                                                 | 2029 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                       | 6                          | 6                                                                                    | 6    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                            |                                                                                      |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Seksi Lalu Lintas Jalan SDP                                                                                                                                                                                   |                                                         |                            |                                                                                      |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                            |                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                            |                                             |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                            |                                             |      |
| KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                            |                                             |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                             |      |
| SK 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan | IKK 2.1.7                  | Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                            |                                             |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                            |                                             |      |
| <p>Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi dokumen perencanaan, regulasi, operasional, sarana prasarana, pengawasan, keselamatan, kinerja, serta sistem informasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan LLAJ.</p> <p>Dokumen teknis berfungsi sebagai pedoman operasional dan acuan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), guna menjamin kepastian hukum, standarisasi layanan, efektivitas pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ adalah Jumlah penyusunan dokumen teknis yang dilaksanakan oleh BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta untuk menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.</p> |                                                         |                            |                                             |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                            |                                             |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Direktorat Lalu Lintas Jalan</li><li>• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>• Seksi Lalu Lintas Jalan SDP</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                            |                                             |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                            |                                             |      |
| <b>IKK 2.1.7 = Jumlah Dokumen Teknis yang dilaksanakan oleh BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta dalam tahun berjalan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                            |                                             |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                            |                                             |      |
| Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                            |                                             |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                            |                                             |      |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                                    | 2027                       | 2028                                        | 2029 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                       | 2                          | -                                           | -    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                            |                                             |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Seksi Lalu Lintas Jalan SDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                            |                                             |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |           |                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |           |                                                                                              |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |           |                                                                                              |      |
| KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |           |                                                                                              |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                   |      |
| SK 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meningkatnya Pelayanan Publik sektor transportasi ASDP | IKK 2.2.2 | Jumlah operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |           |                                                                                              |      |
| <p>SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pelabuhan Sungai dan Danau adalah persyaratan mutu layanan minimum yang wajib dipenuhi operator untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan bagi pengguna jasa angkutan sungai dan danau, diatur dalam Permenhub No. 40 Tahun 2022, tentang tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau yang mencakup aspek keselamatan (kapal laik, awak kompeten, jembatan timbang, portal), pelayanan (informasi, fasilitas penumpang/barang, jadwal), dan administrasi (izin, laporan), dengan pengawasan ketat untuk memastikan standar terpenuhi.</p> <p>Jumlah operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah jumlah satuan pelayanan pelabuhan sungai danau yang menyelenggarakan operasional layanan angkutan sungai dan danau untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan</p> |                                                        |           |                                                                                              |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |           |                                                                                              |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan</li><li>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>Seksi Prasarana SDP</li><li>Satpel Pelabuhan Sungai dan Danau</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |           |                                                                                              |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |           |                                                                                              |      |
| IKK 2.2.2 = ∑ Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau yang melaksanakan operasional layanan angkutan sungai danau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |           |                                                                                              |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |           |                                                                                              |      |
| Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |           |                                                                                              |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |           |                                                                                              |      |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                   | 2027      | 2028                                                                                         | 2029 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                      | -         | -                                                                                            | -    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |           |                                                                                              |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Seksi Prasarana SDP<br>Satpel Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |           |                                                                                              |      |
| CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |           |                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |           |                                                                                              |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                               |      |
| SK 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meningkatnya Pelayanan Publik sektor transportasi ASDP | IKK 2.2.1                        | Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyebrangan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyebrangan memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyebrangan. |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Pelabuhan yang kondisinya baik terhadap Jumlah Pelabuhan SDP.                                                                                                                   |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| Jenis Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | Uraian                           |                                                                                          |      |
| 1. SPM Pelayanan Penumpang<br>2. SPM Pemuatan Kendaraan<br>3. SPM Pengoperasian Kapal                                                                                                                                                                                                            |                                                        | Aspek Keselamatan                |                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Aspek Keamanan                   |                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Aspek Kenyamanan                 |                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Aspek Kemudahan / Keterjangkauan |                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Aspek Kesenjaraan                |                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | Aspek Keteraturan                |                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| • Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| • Seksi Prasarana SDP                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| IKK 2.2.1 = $\sum$ Satpel Pelabuhan Penyebrangan yang melaksanakan operasional layanan angkutan penyebrangan sesuai SPM                                                                                                                                                                          |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                   | 2027                             | 2028                                                                                     | 2027 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                      | -                                | -                                                                                        | -    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| D.I.Yogyakarta Seksi Prasarana SDP                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                  |                                                                                          |      |
| Satpel Pelabuhan Penyebrangan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                  |                                                                                          |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                            |                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                            |                                                                          |       |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                            |                                                                          |       |
| KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                            |                                                                          |       |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                          |       |
| SK 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan | IKK 3.3.1                  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                            |                                                                          |       |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                            |                                                                          |       |
| <p>Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.</p> <p>Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi :</p> <p>1) Alat Penerangan Jalan;</p> <p>2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;</p> <p>3) Marka Jalan;</p> <p>4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;</p> <p>5) Paku Jalan;</p> <p>6) Rambu Lalu Lintas;</p> <p>7) Rambu Tiang Gawang;</p> <p>8) Rambu Tiang F;</p> <p>9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;</p> <p>10) Pagar Pengaman Jalan;</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tnis Perlengkapan Jalan</p> |                                                   |                            |                                                                          |       |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                            |                                                                          |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Direktorat Sarana Prasarana dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan</li><li>• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>• Seksi Lalu Lintas Jalan SDP</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                            |                                                                          |       |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                            |                                                                          |       |
| IKK 3.3.1 = ∑ Perlengkapan Jalan Terpasang sesuai Spesifikasi Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                            |                                                                          |       |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                                                                          |       |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                                                                          |       |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                            |                                                                          |       |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                              | 2027                       | 2028                                                                     | 2029  |
| 23379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36323                                             | 17932                      | 17934                                                                    | 17836 |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                            |                                                                          |       |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Seksi Lalu Lintas Jalan SDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                            |                                                                          |       |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                            |                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                            |                                                                   |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                            |                                                                   |      |
| KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                            |                                                                   |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                   |      |
| SK 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang | IKK 3.1.1                  | Jumlah kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                            |                                                                   |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                            |                                                                   |      |
| <p>BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) adalah UPT {Unit Pelaksana Teknis} di bawah {Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} Kemenhub yang melaksanakan tugas teknis di daerah, termasuk pengawasan angkutan umum AKAP, AJAP, dan Pariwisata.</p> <p>BPTD melakukan pengawasan operasional AKAP (Angkutan Antarkota Antarprovinsi), AJAP (Angkutan AntarJemput AntarProvinsi), dan Pariwisata secara rutin, terutama melalui Ramp Check (inspeksi kelayakan kendaraan), pemeriksaan dokumen (virtual melalui aplikasi Mitra Darat), sosialisasi keselamatan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lain untuk memastikan armada aman, layak jalan, dan sesuai regulasi, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang di wilayah kerjanya.</p> <p>Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan Pengecekan Kelaikan Teknis dan Administrasi Kendaraan untuk menjamin keselamatan dari setiap kendaraan. Kelengkapan administrasi tersebut berupa surat wajib kendaraan yang harus dimiliki serta dibawa oleh angkutan AKAP, AJAP dan Pariwisata berupa kartu BLU-e, Kartu Pengawasan, STNK, dan lain sebagainya.</p> <p>Terkait dengan Pengecekan Kelaikan Teknis Kendaraan dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor bersama dengan PPNS Kemenhub dalam mengecek Komponen Teknis Utama dan Teknis Penunjang dalam menentukan Kelaikan Teknis Kendaraan pada AKAP, AJAP dan Pariwisata.</p> <p>Jumlah kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata adalah Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan AKAP, AJAP, dan Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku</p> |                                                        |                            |                                                                   |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                            |                                                                   |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Angkutan Jalan</li><li>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>Seksi Sarana Jalan SDP</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                            |                                                                   |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                            |                                                                   |      |
| IKK 3.1.1 = ∑ Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan AKAP, AJAP, dan Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                            |                                                                   |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                            |                                                                   |      |
| Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                            |                                                                   |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                            |                                                                   |      |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                   | 2027                       | 2028                                                              | 2029 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                      | 5                          | 5                                                                 | 5    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                            |                                                                   |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Seksi Sarana Jalan SDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                            |                                                                   |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                  |      |
| SK 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meningkatnya Kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety |      | IKK 3.2.1                  | Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| <p>Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Karoseri adalah surat izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa rancangan bangun fisik kendaraan yang akan dibuat atau dimodifikasi oleh perusahaan karoseri telah memenuhi persyaratan keselamatan dan layak jalan.</p> <p>SKRB Karoseri diterbitkan untuk kendaraan bermotor yang telah dilakukan modifikasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh perusahaan karoseri. Modifikasi yang dilakukan dapat berupa perubahan bentuk, ukuran, kapasitas, maupun fungsi kendaraan.</p> <p>Kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan oleh BPTD adalah proses verifikasi desain dan konstruksi kendaraan hasil modifikasi atau karoseri untuk memastikan kesesuaian standar teknis, keselamatan, dan laik jalan dengan ketentuan SKRB yang dimiliki sebelum diproduksi massal atau digunakan di jalan.</p> <p>Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman adalah Jumlah pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan yang terlaksana sesuai jumlah permohonan yang masuk.</p> |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Sarana Transportasi Jalan</li><li>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>Seksi Sarana Jalan SDP</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| $IKK\ 3.2.1 = \sum \text{Pemeriksaan fisik} / \sum \text{Permohonan Karoseri}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                                                         | 2026 | 2027                       | 2028                                                                             | 2029 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                           | 12   | 12                         | 12                                                                               | 12   |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Seksi Sarana Jalan SDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |                            |                                                                                  |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------|------|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                  |      |
| SK 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meningkatnya Kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety |      | IKK 3.2.2                  | Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| <p>Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar. Kalibrasi dilaksanakan setahun sekali untuk setiap UPUPKB. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan alat uji, sehingga dapat memberikan hasil yang tepat dalam pemeriksaan kendaraan.</p> <p>Bahwa kalibrasi merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan berkendara. dengan melakukan kalibrasi secara rutin dapat memastikan bahwa alat-alat uji yang digunakan memberikan hasil yang akurat. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.</p> <p>Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD</p> |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Sarana Transportasi Jalan</li><li>Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>Seksi Sarana Jalan SDP</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| $IKK\ 3.2.1 = \sum Kalibrasi\ Alat\ Uji / \sum Jumlah\ UPUPKB\ PEMDA\ (KAB/KOTA)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025                                                                         | 2026 | 2027                       | 2028                                             | 2029 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                            | 3    | 3                          | 3                                                | 3    |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |      |                            |                                                  |      |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogvakarta Seksi Sarana Jalan SDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |      |                            |                                                  |      |

| PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |      |                            |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------------------------|--|
| INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                               |  |
| SK 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meningkatnya Kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety |      | IKK 3.2.3                  | Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| DEFINISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| <p>Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor adalah proses membandingkan dan menyetel ulang akurasi alat uji (seperti alat uji emisi, rem, lampu, dll.) dengan standar atau tolok ukur yang terkalibrasi secara berkala untuk memastikan hasil pengujian kendaraan akurat dan sesuai standar, serta demi menjaga keselamatan berkendara. Kegiatan ini wajib dilakukan karena alat uji yang tidak akurat dapat menyebabkan kendaraan yang tidak laik jalan tetap beroperasi, yang berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas</p> <p>Proses kalibrasi dilakukan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Membandingkan pengukuran alat uji dengan alat standar/referensi yang sudah terkalibrasi.</li><li>• Menyetel ulang alat uji jika perlu agar kembali akurat.</li></ul> <p>Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi adalah Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan oleh BPTD guna mendukung pelaksanaan kegiatan Kalibrasi alat uji UPUPKB Pemda diwilayah kerja</p> |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Direktorat Sarana Transportasi Jalan</li><li>• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta</li><li>• Seksi Sarana Jalan SDP</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| CARA MENGHITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| $IKK\ 3.2.3 = \sum \text{Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi dalam tahun berjalan (n)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| SATUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                         | 2027 | 2028                       | 2029                                          |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                            | 1    | 1                          | 1                                             |  |
| PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |      |                            |                                               |  |
| Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II<br>D.I.Yogyakarta Seksi Sarana Jalan SDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |      |                            |                                               |  |

**Tabel 2.3 Manual Perhitungan Indikator Kegiatan**

| SASARAN PROGRAM (SP)                                                             | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)                                                 | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KETERANGAN                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Perhubungan | Indeks RB Kementerian Perhubungan | Peningkatan Indeks Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat dihitung dengan penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan yang dilakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi Perencanaan (40%), Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga (K/L) (40%) dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%) | 2025 : 96,20, 2029 : 96,40<br>Nilai diperoleh dari Pengukuran External (Biro Perencanaan atau Itjen) atau perhitungan mandiri oleh Setditjen Perhubungan Darat |
|                                                                                  |                                   | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat         | Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020).  | Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)             | 2025 : 82,82, 2029 : 82,90<br>Nilai diperoleh dari Pengukuran Inspektorat Jenderal                                                                             |
|                                                                                  |                                   | Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat                | Capaian Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dihitung dengan Indikator yang diusulkan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Kemenhub(Penyerapan Anggaran)                                                                                                                                            | Penentuan skor untuk indeks indikator Penyerapan Anggaran adalah persentase realisasi tingkat pencapaian Penyerapan Anggaran Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat                                                                                                                                                     | 2025 : 94,10, 2029 : 94,80<br>Nilai diperoleh dari Pengukuran DJA Kementerian Perhubungan                                                                      |
|                                                                                  |                                   | Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat              | Parameter penilaian kinerja pengelolaan Barang Milik Negara pada Ditjen Perhubungan Darat yang terukur dalam bentuk indeks, berfungsi mengukur kualitas tata kelola aset pada suatu instansi pemerintah, menjadi bagian evaluasi reformasi birokrasi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset sesuai standar | Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan indikator sebagai berikut Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Akuntabel dan Produktif; Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan; Pengawasan dan Pengendalian BMN yang efektif; dan Administrasi BMN yang andal.             | 2025 : 3,20, 2029 : 3,55<br>Nilai diperoleh dari Pengukuran DJKN Kementerian Perhubungan                                                                       |
|                                                                                  |                                   | Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK (Status Proses)                     | Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK karena menjadi pertimbangan opini Laporan Keuangan, dan entitas wajib menindaklanjuti dalam 60 hari setelah LHP diterima.                                                                                                                                                               | Prosentase dihitung dari jumlah Rekomendasi BPK yang telah di tindaklanjuti ( <b>Status Proses</b> ) dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima.                                                                                                                                                                                  | 2025 : 100%, 2029 : 100%<br>Nilai diperoleh dari Perhitungan oleh Bagian Keuangan Setditjen Perhubungan Darat                                                  |

|  |  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Peningkatan Pengawasan Kearsipan                                                                                          | Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                            | Semakin tinggi tingkat digitalisasi arsip di suatu instansi, maka tantangan pengawasan kearsipan juga semakin kompleks, Capaian kegiatan tingkat digitalisasi arsip dihitung dengan Pengawasan Kearsipan Internal, Sosialisasi Kearsipan | 2025 : 85,51, 2029 : 85,59<br>Nilai diperoleh dari Pengukuran ANRI atau Biro Umum pada Ditjen Perhubungan Darat |
|  |  | Peningkatan Reformasi Hukum Ditjen Perhubungan Darat                                                                      | Proses berkelanjutan untuk menganalisis, memperbaiki, dan memperbarui sistem hukum secara menyeluruh (substansi, struktur, dan budaya hukum) agar lebih adil, efektif, efisien, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat penegak hukum, perlindungan HAM, dan partisipasi publik, bukan sekadar mengganti aturan, tetapi juga memperbaiki pelaksanaannya. | Prosentase dihitung kumulatif dari jumlah Draft Peraturan atau revisi peraturan yang telah di proses pada Biro Hukum Kemenhub.<br>Jumlah target Peraturan perundangan yang harus diselesaikan Tahun 2025-2029 (Target 16 paket).         | 2025 : 6%, 2029 : 100%<br>Nilai diperoleh dari Perhitungan oleh Bagian Hukum Humas dan Umum                     |
|  |  | Prosentase Penyelesaian Kerjasama dan Kemitraan Transportasi Darat                                                        | Tingkat efektivitas dan keberhasilan instansi pemerintah dalam menyelesaikan atau mengimplementasikan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain (baik internal pemerintah, swasta, maupun masyarakat) untuk mencapai tujuan bersama dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.                                                                                                                                | Prosentase dihitung kumulatif dari jumlah kerjasama atau kemitraan yang telah dilakukan dibandingkan rencana kerjasama atau kemitraan yang dilakukan Tahun 2025-2029                                                                     | 2025 : 20%, 2029 : 100%<br>Nilai diperoleh dari Perhitungan oleh Bagian Hukum Humas dan Umum                    |
|  |  | Prosentase Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat | Ukuran keberhasilan sebuah instansi dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi publik yang masuk melalui sistem LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak warga negara, dan melakukan perbaikan berkelanjutan, menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik nasional.            | Prosentase dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dibandingkan pengaduan yang masuk dalam 1 tahun                                                                                                                     | 2025 : 100, 2029 : 100<br>Nilai diperoleh dari Perhitungan oleh Bagian Hukum Humas dan Umum                     |
|  |  | Peningkatan Layanan Informasi Ditjen Perhubungan Darat (PPID)                                                             | Indikator peningkatan layanan informasi pada reformasi birokrasi merujuk pada kriteria terukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan informasi pemerintah kepada                                                                                                                                                                                                                                                             | Peningkatan layanan informasi PPID dalam Reformasi Birokrasi diukur melalui integrasi Indikator Kinerja Utama, Indeks Kepuasan Masyarakat, serta penilaian kematangan kebijakan pelayanan publik                                         | 2025 : 94, 2029 : 100<br>Nilai diperoleh dari Perhitungan oleh Bagian Hukum Humas dan Umum                      |

|  |  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                       | masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | yang berorientasi pada transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|  |  | Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat          | Standar penilaian terukur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metode perhitungan Indeks Sistem Merit (ISM) SDM pada reformasi birokrasi di Indonesia didasarkan pada penilaian terhadap delapan aspek manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), masing-masing dengan bobot yang telah ditentukan. Penilaian ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 40 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (Perka KASN) Nomor 9 Tahun 2019. | 2025 : 296, 2029 : 300<br>Nilai diperoleh dari Perhitungan Mandiri oleh Bagian Sumber Daya Manusia                                 |
|  |  | Peningkatan capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi       | Sebuah indikator yang digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi Pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi untuk menilai tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel                                                                                                                                                                         | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, penilaian dilakukan oleh Instansi Pemerintah (dalam hal ini dilakukan penilaian mandiri oleh Kementerian Perhubungan)                                                                                    | 2025 : 5, 2029 : 5<br>Nilai diperoleh dari Perhitungan Mandiri oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana                             |
|  |  | Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat | Ukuran terukur yang menunjukkan sejauh mana suatu unit kerja berhasil membangun komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima, melalui perbaikan di enam area perubahan utama: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berujung pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan | Perhitungan pada Ditjen Perhubungan darat yaitu jumlah Unit Kerja yang diusulkan WBK atau WBBM oleh Inspektorat Jenderal kepada Kementerian PAN dan RB dalam rata-rata 3 tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 : 0,75, 2029 : 1<br>Nilai diperoleh dari evaluasi Mandiri oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana atau ditetapkan oleh Menpan |
|  |  | Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat       | alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kepuasan publik terhadap layanan transportasi, meliputi aspek seperti persyaratan, prosedur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metode perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada konteks reformasi birokrasi di Indonesia diatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 : 96,47, 2029 : 97,00                                                                                                         |

|  |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                               | waktu, biaya, kompetensi petugas, hingga sarana prasarana. Hasil IKM menunjukkan seberapa baik pelayanan transportasi telah memenuhi harapan masyarakat, menjadi dasar perbaikan kinerja dan evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pengukuran ini melibatkan survei terhadap pengguna layanan dengan menggunakan kuesioner yang mencakup 14 unsur (indikator) pelayanan publik. | Nilai diperoleh dari hasil evaluasi Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat                            |
|  |  | Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi | <p>Perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan. Penyederhanaan struktur organisasi ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, efisien, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Penyederhanaan struktur organisasi bertujuan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi lapisan birokrasi yang tidak efisien.<br/>Penyederhanaan struktur bukan sekadar menghapus jabatan, tetapi juga mempertegas peran kepemimpinan di tingkat atas (eselon I dan II) untuk menggerakkan birokrasi dengan visi yang jelas</li> <li>Meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan.<br/>Struktur birokrasi yang gemuk sering kali menyebabkan lambatnya koordinasi dan pengambilan kebijakan. Penyederhanaan struktur terutama dari banyaknya lapisan eselon memotong rantai komando sehingga proses menjadi lebih cepat dan gesit</li> <li>Meningkatkan kualitas pelayanan publik.<br/>PSO diarahkan untuk menghasilkan birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis</li> </ol> | Penghitungan Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) dilakukan oleh Setditjen Perhubungan Darat atau penilaian External                                                                                                                                                                                | 2025 : 92,9 2029 : 92,9<br>Nilai diperoleh dari hasil evaluasi Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat |

|  |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                              | <p>kinerja, memperbaiki layanan publik dengan proses yang lebih sederhana dan cepat</p> <p>d. Mewujudkan organisasi pemerintah yang lebih dinamis dan profesional.</p> <p>Dengan fokus pada jabatan fungsional, pengelolaan SDM menjadi berbasis keahlian dan kompetensi, bukan semata struktur hierarki. Hal ini mendorong budaya kerja lebih inovatif dan profesional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
|  |  | Peningkatan Indeks Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Darat | <p>suatu instrumen untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berdasarkan berbagai aspek pelayanan. IPP bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Ruang lingkup Indeks Pelayanan Publik yang tergambar dalam Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi 6 (enam) aspek, yaitu: 1) kebijakan pelayanan, 2) profesionalisme SDM, 3) sarana prasarana, 4) sistem informasi pelayanan publik, 5) konsultasi dan pengaduan, 6) inovasi pelayanan. Untuk menilai masing-masing aspek tersebut disusun sejumlah indikator yang dikelompokkan untuk mempermudah identifikasi pengaruhnya terhadap aspek yang dievaluasi</p> | <p>Hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja 0 - 5<br/> 4,51 - 5,00 (A) = Pelayanan Prima 4,01 - 4,50 (A-) = Sangat Baik <math>\geq 3,51</math> 60<br/> Jdih.menpan.go.id</p> | <p>2025 : 4,00 2029 : 4,04<br/> Nilai diperoleh dari hasil evaluasi Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat</p> |

## **BAB 3**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

##### **1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan menurut Permen PPN/Kepala Bappenas No.10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Hasil identifikasi diperoleh 9 (sembilan) isu strategis pada bidang perhubungan darat sebagai berikut:

2. Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik;
3. Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan;
4. Konektivitas wilayah daratan;
5. Afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK;
6. Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan;
7. Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
8. Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil;
9. Penanganan kendaraan barang ODOL; dan
10. Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

adalah sebagai berikut:

1. AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang;
2. AK.2 Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan;
3. AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan;
4. AK.4 Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan;
5. AK.5 Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai

- Jembatan Konektivitas Antar Pulau;
6. AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
  7. AK.7 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan;
  8. AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus;
  9. AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja;
  10. AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi;
  11. AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul;
  12. AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi;
  13. AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat.

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II**

### **D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029**

Menjabarkan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional Asta Cita 2, Asta Cita 3, dan Asta Cita 5, serta arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan, melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, dirumuskan 4 (Empat) Sasaran Program dan 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan

#### **a. Arah Kebijakan Penanganan Isu Strategis Nasional**

Sasaran program di atas merupakan jawaban dari isu strategis yang menjadi tantangan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Secara umum terdapat 4 (empat) fokus kebijakan yang berkaitan dengan sub sektor perhubungan darat, yakni (1) konektivitas, (2) kinerja pelayanan transportasi, (3) keselamatan transportasi dan, (4) kualitas tata Kelola pemerintahan. Adapun arah kebijakan umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I. Yogyakarta untuk menangani isu strategis nasional tersebut disampaikan pada Tabel 3.1

**Tabel 3. 1** Arah Kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat untuk Isu Strategis Nasional

| ISU STRATEGIS                                                          | ARAH KEBIJAKAN                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konektivitas wilayah daratan                                           | Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan                    |
| Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan | Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan  |
| Penanganan kendaraan barang ODOL                                       | Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus                        |
| Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.          | Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja |

**b. Arah Kebijakan Penanganan Isu Strategis Nasional**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2025-2029, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana telah dijelaskan dalam Sub Bab 2.3.2. secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta terdiri dari:

1. AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang;
2. AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan;
3. AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
4. AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus;
5. AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja;
6. AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi;

7. AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul;
8. AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi;
9. AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat.

Secara hirarki AK.3 dan AK.4 merupakan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Program 1, dan Sasaran Program 1 dan 2 yaitu mewujudkan konektivitas serta meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat. Selanjutnya, AK.6 dan AK.8 merupakan arah kebijakan untuk menjawab tantangan Sasaran Program 3, yaitu meningkatnya keselamatan dan keamanan angkutan lalu lintas angkutan jalan. AK.9, AK. 10, AK.11, AK.12, dan AK. 13 merupakan arahan dalam upaya pencapaian Sasaran Program 4, yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

**Tabel 3. 2** Arah kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I D.I.Yogyakarta

## **BAB 4**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan**

Target kinerja Program Penyelenggaraan Transportasi Darat diukur dari pencapaian

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun besaran target yang dicanangkan untuk masing-masing tahun selama perioda 2025-2029 dan manual perhitungan disampaikan pada **Tabel 4.1**.

**Tabel 4.1** Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta

| NO. | SASARAN KEGIATAN |                                                                  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                               | SATUAN   | BASELINE<br>2024 | TARGE<br>T 2025 | TARGE<br>T 2026 | TARGE<br>T 2027 | TARGE<br>T 2028 | TARGE<br>T 2029 |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2)              |                                                                  | (3)                        |                                                                                               | (4)      | (5)              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.  | SK<br>1.1.1      | Meningkatnya<br>konektivitas jaringan<br>transportasi DTPK       | IKK<br>1.1.1.A             | Jumlah Layanan Subsidi<br>Transportasi Angkutan<br>Jalan                                      | Trayek   | 9                | 9               | 13              | 13              | 13              | 13              |
|     |                  |                                                                  | IKK 1.1.4                  | Jumlah terminal Barang<br>yang dibangun dan<br>beroperasi untuk<br>mendukung konektivitas     | Unit     | -                | -               | -               | -               | 1               | -               |
| 2.  | SK 2.1           | Meningkatnya<br>pelayanan publik<br>sektor transportasi<br>Jalan | IKK 2.1.1                  | Jumlah terminal tipe A yang<br>ditingkatkan pelayanannya<br>untuk memenuhi SPM                | Unit     | -                | 1               | 1               | 4               | -               | -               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.2                  | Jumlah operasional layanan<br>terminal tipe A sesuai SPM                                      | Unit     | 4                | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.3                  | Jumlah Fasilitas<br>Penimbangan KB yang<br>ditingkatkan pelayanannya<br>untuk memenuhi SPM    | Unit     | -                | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.5                  | Jumlah operasional layanan<br>Fasilitas Penimbangan KB<br>sesuai SPM                          | Unit     | 4                | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.6                  | Jumlah Monitoring Evaluasi<br>terkait Peningkatan<br>Pelayanan Tugas Pokok dan<br>Fungsi LLAJ | Kegiatan | -                | 6               | 6               | 6               | 6               | 6               |
|     |                  |                                                                  | IKK 2.1.7                  | Penyusunan<br>Dokumen Teknis<br>terkait TUSI                                                  | Dokumen  | -                | 2               | 0               | 2               | 0               | 0               |
| 3.  | SK 2.2           | Meningkatnya<br>pelayanan publik<br>sektor transportasi<br>ASDP  | IKK 2.2.7                  | Jumlah Monitoring Evaluasi<br>terkait Peningkatan<br>Pelayanan Tugas Pokok dan<br>Fungsi ASDP | Kegiatan | -                | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               |

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                        | SATUAN   | BASLINE<br>2024 | TARGE<br>T 2025 | TARGE<br>T 2026 | TARGE<br>T 2027 | TARGE<br>T 2028 | TARGE<br>T 2029 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                                                 | (3)                                                                                               | (4)      | (5)             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.  | SK 3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang                       | IKK 3.1.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di D.I.Yogyakarta     | Kegiatan | -               | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               |
| 5.  | SK 3.2 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety | IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman        | Laporan  | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              |
|     |                                                                                     | IKK 3.2.2 Jumlah alat uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB                                        | Kegiatan | 1               | 2               | 3               | 3               | 3               | 3               |
|     |                                                                                     | IKK 3.2.3 Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi                                       | Kegiatan | -               | -               | -               | 1               | 1               | 1               |
|     | SK 3.3 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan                            | IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis                | %        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     |                                                                                     | IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman                   | Lokasi   | -               | 5               | 6               | 5               | 6               | 8               |
|     |                                                                                     | IKK 3.3.3 Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman | Lokasi   | -               | -               | 11              | 16              | 2               | 16              |
| 6   | SK 3.4 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan              | IKK 3.4.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman                                      | Orang    | 1.500           | 1.500           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                               | SATUAN   | BASELINE<br>2024 | TARGE<br>T 2025 | TARGE<br>T 2026 | TARGE<br>T 2027 | TARGE<br>T 2028 | TARGE<br>T 2029 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                                   | (3)                                                                                                                                      | (4)      | (5)              |                 |                 |                 |                 |                 |
|     |                                                                       | IKK 3.4.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda | Orang    | -                | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7   | SK 4 Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat | IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)                                                            | Kegiatan | -                | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               |
|     |                                                                       | IKK4.2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)                                                                              | Nilai    | -                | 84,46           | 84,47           | 84,48           | 84,49           | 85              |
|     |                                                                       | IKK4.3 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)                                                                  | Nilai    | -                | 90              | 91              | 92              | 93              | 94              |
|     |                                                                       | IKK4.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)                            | %        | -                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     |                                                                       | IKK4.6 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)                                         | Nilai    | -                | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              |
|     |                                                                       | IKK4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                    | Kegiatan | -                | 2               | 3               | 5               | 5               | 5               |
|     |                                                                       | IKK4.8 Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)                                                                 | Kegiatan | -                | 2               | 3               | 3               | 3               | 3               |

Sumber: Hasil Analisis (2025)

## 4.2 Kerangka Pendanaan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta

Kebutuhan Pendanaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang termasuk ke dalam program penyelenggaraan transportasi darat untuk periode pembangunan 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 4.2** Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta

| SASARAN KEGIATAN |                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                  | RINCIAN OUTPUT (RO) |             |             |             |             | ANGGARAN DALAM RUPIAH |                |                |                |               | KETERANGAN  |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                  |                                                         |                            |                                                                                  | TARGET 2025         | TARGET 2026 | TARGET 2027 | TARGET 2028 | TARGET 2029 | 2025                  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029          |             |
| SK 1.1.1         | Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK    | IKK 1.1.1.A                | Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan                               | 9                   | 13          | 13          | 13          | 13          | 4.799.830.000         | 6.862.806.905  | 7.464.430.653  | 8.921.648.976  | 9.607.929.666 |             |
|                  |                                                         | IKK 1.1.4                  | Jumlah terminal Barang yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas | -                   | -           | -           | 1           | -           | -                     | -              | -              | 40.000.000.000 | -             | Usulan Baru |
| SK 2.1           | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan | IKK 2.1.1                  | Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM         | 1                   | 1           | 4           | -           | -           | 1.630.000.000         | 15.215.000.000 | 36.980.000.000 | -              | -             |             |
|                  |                                                         | IKK 2.1.2                  | Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM                            | 4                   | 4           | 4           | 4           | 4           | 8.119.721.000         | 4.810.519.000  | 2.800.993.000  | 4.201.489.500  | 6.722.383.200 |             |
|                  |                                                         | IKK 2.1.3                  | Jumlah Fasilitas Penimbanga                                                      | 1                   | 1           | 1           | 1           | 1           | 305.000.000           | 190.920.000    | 381.840.000    | 572.760.000    | 859.140.000   |             |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| SASARAN KEGIATAN |                                                        | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                     | RINCIAN OUTPUT (RO) |             |             |             |             | ANGGARAN DALAM RUPIAH |               |               |               |               | KETERANGAN |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                  |                                                        |                                                                                                | TARGET 2025         | TARGET 2026 | TARGET 2027 | TARGET 2028 | TARGET 2029 | 2025                  | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |            |
|                  |                                                        | KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM                                           |                     |             |             |             |             |                       |               |               |               |               |            |
|                  |                                                        | IKK 2.1.5 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM                       | 4                   | 4           | 4           | 4           | 4           | 6.363.734.000         | 4.011.799.000 | 2.949.573.300 | 4.424.278.950 | 7.078.846.320 |            |
|                  |                                                        | IKK 2.1.6 Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ | 6                   | 6           | 6           | 6           | 6           | 598.087.000           | 598.087.000   | 598.087.000   | 598.087.000   | 598.087.000   |            |
|                  |                                                        | IKK 2.1.7 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI                                               | 2                   | 0           | 2           | 0           | 0           | 198.500.000           | -             | 958.769.000   | -             | -             |            |
| SK 2.2           | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP | IKK 2.2.7 Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP | 5                   | 5           | 5           | 5           | 5           | 36.000.000            | 36.000.000    | 36.000.000    | 36.000.000    | 36.000.000    |            |
| SK 3.1           | Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang | IKK 3.1.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di D.I.Yogyakarta  | 5                   | 5           | 5           | 5           | 5           | 126.425.000           | 126.425.000   | 126.425.000   | 126.425.000   | 126.425.000   |            |

|        |                                                    |           |                                                                                  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| SK 3.2 | Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi | IKK 3.2.1 | Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 350.000.000 | 700.000.000 | 350.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

| SASARAN KEGIATAN          |                                                   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                         | RINCIAN OUTPUT (RO) |             |             |             |             | ANGGARAN DALAM RUPIAH |                |                |                |                | KETERANGAN |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                           |                                                   |                            |                                                                                         | TARGET 2025         | TARGET 2026 | TARGET 2027 | TARGET 2028 | TARGET 2029 | 2025                  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |            |
| active dan passive safety |                                                   | IKK 3.2.2                  | Jumlah alat uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB                                        | 2                   | 3           | 3           | 3           | 3           | 109.675.000           | 109.675.000    | 109.675.000    | 109.675.000    | 109.675.000    |            |
|                           |                                                   | IKK 3.2.3                  | Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi                                       | -                   | -           | 1           | 1           | 1           | -                     | -              | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  |            |
| SK 3.3                    | Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan | IKK 3.3.1                  | Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis                | 23379               | 36323       | 17932       | 17934       | 17836       | 12.119.954.000        | 93.553.702.000 | 61.415.932.000 | 61.442.908.000 | 61.509.908.000 |            |
|                           |                                                   | IKK 3.3.2                  | Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman                   | 1                   | 6           | 5           | 6           | 8           | 1.520.000.000         | 2.280.000.000  | 1.610.000.000  | 1.940.000.000  | 2.580.000.000  |            |
|                           |                                                   | IKK 3.3.3                  | Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman | -                   | 11          | 16          | 2           | 16          | -                     | 1.443.750.000  | 1.320.000.000  | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  |            |
| SK 3.4                    | Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan  | IKK 3.4.1                  | Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman                                      | 1.500               | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 250.000.000           | 350.000.000    | 350.000.000    | 350.000.000    | 350.000.000    |            |

|                |           |                                                                                                                                |     |     |     |     |     |             |             |             |             |             |  |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| berkeselamatan | IKK 3.4.2 | Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 110.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 |  |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

| SASARAN KEGIATAN |                                                                  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                        | RINCIAN OUTPUT (RO) |             |             |             |             | ANGGARAN DALAM RUPIAH |            |            |            |            | KETERANGAN |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |                                                                  |                            |                                                                                                        | TARGET 2025         | TARGET 2026 | TARGET 2027 | TARGET 2028 | TARGET 2029 | 2025                  | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |            |
| SK 4             | Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat | IKK 4.1                    | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)                                  | 3                   | 3           | 3           | 3           | 3           | 142.142.858           | 38.508.334 | 38.508.334 | 38.508.334 | 38.508.334 |            |
|                  |                                                                  | IKK4.2                     | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)                                                   | 84,46               | 84,47       | 84,48       | 84,49       | 85          | 142.142.857           | 38.508.333 | 38.508.333 | 38.508.333 | 38.508.333 |            |
|                  |                                                                  | IKK4.3                     | Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)                                       | 90                  | 91          | 92          | 93          | 94          | 142.142.857           | 50.790.000 | 50.790.000 | 50.790.000 | 50.790.000 |            |
|                  |                                                                  | IKK4.4                     | Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) | 100                 | 100         | 100         | 100         | 100         | 142.142.857           | 59.838.000 | 59.838.000 | 59.838.000 | 59.838.000 |            |
|                  |                                                                  | IKK4.6                     | Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)              | 90                  | 90          | 90          | 90          | 90          | 142.142.857           | 38.508.333 | 38.508.333 | 38.508.333 | 38.508.333 |            |

|  |        |                                                                   |   |   |   |   |   |                |                |                |                |                |  |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|  | IKK4.7 | Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                    | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 162.000.000    | 10.824.000.000 | 10.824.000.000 | 10.824.000.000 | 10.824.000.000 |  |
|  | IKK4.8 | Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24.061.178.714 | 44.939.170.000 | 38.240.488.000 | 38.240.488.000 | 38.240.488.000 |  |

#### **4.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Bidang Transportasi Darat Tahun 2025-2029**

Pengendalian Internal atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini dilatar belakangi dengan telah bergesernya karakter pengendalian intern dari hard control menuju soft control. Artinya pengendalian tidak lagi efektif jika dikemas dalam kegiatan yang bersifat represif. Ruang lingkup pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi seluruh kegiatan kepengemrintahan. Komponen pengendalian intern terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Fungsi manajemen risiko dalam pemerintahan diperkuat dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) mengamanatkan adanya manajemen risiko terintegrasi di dalam maupun lintas instansi pemerintah. Mendukung implementasi tersebut. MRPN merupakan suatu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN, mengingat adanya risiko dalam pembangunan nasional. MRPN juga mengolaborasi manajemen risiko yang telah ada dan tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke dalam sebuah Manajemen Risiko Lintas Sektor. Pembangunan nasional di sektor transportasi darat merupakan fondasi vital bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sasaran strategis yang berfokus pada tiga pilar utama: peningkatan konektivitas untuk menyatukan wilayah dan menekan biaya logistik, peningkatan kualitas pelayanan untuk menjamin aksesibilitas dan kepuasan publik, serta penguatan keselamatan untuk menekan angka kecelakaan dan korban jiwa. Namun, realisasi ketiga sasaran tersebut dihadapkan pada berbagai ketidakpastian dan potensi risiko inheren yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan. Manifestasi risiko pada sasaran konektivitas dapat berupa keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, eskalasi biaya, dan kendala pembebasan lahan. Pada aspek pelayanan, risiko terwujud dalam bentuk kegagalan operasional, rendahnya tingkat integrasi antarmoda, dan ketidakpuasan masyarakat akibat standar yang tidak terpenuhi. Sementara itu, pada pilar keselamatan, risiko termanifestasi sebagai tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi signifikan. Oleh karena itu, penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang terstruktur dan sistematis menjadi sebuah keniscayaan. Pendekatan proaktif ini esensial untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi berbagai potensi ancaman tersebut, sehingga dapat menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan investasi dalam pembangunan transportasi darat serta memastikan sasaran strategis nasional dapat tercapai secara optimal. Matrik MRPN Sektor Transportasi Darat dalam Resntra Ditjen Darat 2025-2029 menjelaskan bahwa pengelolaan risiko menjadi instrumen penting untuk menjamin pencapaian sasaran program Ditjen Perhubungan Darat secara efektif dan berkelanjutan. Sasaran peningkatan konektivitas transportasi darat yang diukur melalui rasio konektivitas jalan menghadapi beragam risiko strategis, antara lain kesiapan lahan, ketersediaan

anggaran, kompetensi SDM pengadaan barang/jasa, perizinan, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Risiko-risiko tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan implementasi program, sehingga manfaat pembangunan tidak optimal. Oleh karena itu, Ditjen Perhubungan Darat menetapkan langkah mitigasi berupa penyusunan SOP hibah yang jelas, prioritas pembangunan pada lahan yang siap administrasi, penggunaan data perencanaan yang kredibel, serta penguatan regulasi kompetensi PPK dan staf Barjas. Selanjutnya, pada sasaran peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), risiko utama meliputi keterbatasan anggaran, sarana prasarana, kualitas SDM, dan perubahan kebijakan. Risiko tersebut berdampak langsung pada tidak optimalnya pelayanan publik. Mitigasi difokuskan pada penguatan perencanaan berbasis data, pembinaan SDM secara berkelanjutan, serta penegakan SOP dan sanksi guna mencegah korupsi dan maladministrasi. Adapun pada sasaran peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, risiko mencakup faktor manusia, kendaraan, infrastruktur, pengawasan, dan perubahan lingkungan. Mitigasi dilakukan melalui kampanye keselamatan, peningkatan fasilitas uji kendaraan, audit infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan berbasis data real time. Dengan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, Ditjen Perhubungan Darat diharapkan mampu memastikan ketercapaian target Renstra 2025– 2029 secara akuntabel dan berorientasi hasil.

| NO | SASARAN PROGRAM                              | INDIKATOR PROGRAM                                                                     | RISIKO                              | PEMILIK RISIKO                                                     | PENYEBAB                                                                                                                                                                 | AKIBAT                                                            | MITIGASI TKT DITJEN DARAT                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat | 10. Rasio konektivitas transportasi Jalan<br>11. Rasio Konektivitas Transportasi ASDP | 1. Kesiapan lahan                   | 1. Pemerintah Daerah, Ditjen Phb Darat                             | 1. Proses Hibah tidak clear (External), Lemahnya check and double check (Internal)                                                                                       | Keterlambatan Implementasi atau kegagalan pelaksanaan dan Manfaat | 1. Membangun SOP yang jelas terkait proses hibah serta Prioritas Pembangunan hanya untuk lahan yang sdh siap secara administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan |
|    |                                              |                                                                                       | 2. Ketersediaan anggaran            | 2. Ditjen Phb Darat, Setjen Kemenhub, Kementerian Keuangan, DPR RI | 2. Kesalahan Perhitungan (Internal), Efisiensi (Internal - External)                                                                                                     | Keterlambatan Implementasi atau kegagalan pelaksanaan dan Manfaat | 2. Penggunaan dataperencanaan yang kredibel dan mencari peluang alternatif pembiayaan                                                                           |
|    |                                              |                                                                                       | 3. Kompetensi SDM Barjas            | 3. Ditjen Phb Darat                                                | 3. Tidak ada Aturan yang mengatur, kelemahan SOP, ketidakpatuhan terhadap aturan (Internal)                                                                              | Korupsi dan Maladministrasi                                       | 3. Regulasi yang ketat mengatur kompetensi PPK dan Staf Barjas, SOP rinci dan jelas serta Sanksi yang tegas                                                     |
|    |                                              |                                                                                       | 4. Kesiapan perijinan               | 4. Kemen LHK, Kemen ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Ditjen Phb Darat   | 4. Perubahan peraturan (External), kelemahan SDM (External), kurang koordinasi pada awal perencanaan (Internal), tidak adanya rencana induk yang komprehensif (Internal) | Keterlambatan Implementasi atau kegagalan pelaksanaan dan Manfaat | 4. Koordinasi yang rutin dan rinci, susun masterplan/blue print yang jelas dan melibatkan semula pihak                                                          |
|    |                                              |                                                                                       | 5. Tingkat Komprehensif Perencanaan | 5. Ditjen Darat                                                    | 5. Konsultan tidak profesional, Pembahasan tidak komprehensif, kesalahan penyusunan KAK (Internal)                                                                       | Keterlambatan Implementasi atau kegagalan pelaksanaan             | 5. Susun SOP jelas terkait penyusunan KAK dan penyedia jasa serta teknis pembahasan hasil konsultan, SANKSI tegas kepada Konsultan dan PPK                      |

| NO | SASARAN PROGRAM                                   | INDIKATOR PROGRAM                                                                    | RISIKO                                         | PEMILIK RISIKO                                                     | PENYEBAB                                                                              | AKIBAT                                                                                                      | MITIGASI TKT DITJEN DARAT                                                              |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                                                                      | 6. Kelemahan Koordinasi antar Lembaga/instansi | 6. Ditjen Phb Darat                                                | 6. Kelemahan SDM yang dimandatkan dan Kelemahan pengawasan atasan langsung (Internal) | Keterlambatan Implementasi atau kegagalan pelaksanaan                                                       | 6. Pemberian Sanksi yang tegas                                                         |
|    |                                                   |                                                                                      | 7. Penolakan Masyarakat                        | 7. Ditjen Phb Darat, Pemerintah Daerah                             | 7. Tidak ada/kurangnya sosialisasi (Internal - External)                              | Keterlambatan Implementasi atau kegagalan pelaksanaan Keterlambatan Implementasi atau kegagalan pelaksanaan | 7. Susun SOP jelas dan peraturan Sanksi                                                |
|    |                                                   |                                                                                      | 8. Perubahan Kebijakan                         | 8. BAPPENAS, KEMENHUB, KEMENKEU                                    | 8. Perubahan Kepemimpinan / Perubahan Arah Kebijakan (Internal - External)            |                                                                                                             | TIDAK ADA                                                                              |
| 2  | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Darat | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi Darat | 1. Ketersediaan anggaran                       | 1. Ditjen Phb Darat, Setjen Kemenhub, Kementerian Keuangan, DPR RI | 1. Kesalahan Perhitungan (Internal), Efisiensi(Internal - External)                   | Keterlambatan Implementasi kebijakan dan Pelayanan tidak Optimal                                            | 1. Penggunaan data perencanaan yang kredibel dan mencari peluang alternatif pembiayaan |
|    |                                                   |                                                                                      | 2. Keterbatasan sarana dan prasarana           | 2. Ditjen Phb Darat                                                | 2. Kelemahan SDM yang dimandatkan dan Kelemahan pengawasan atasan langsung (Internal) | Pelayanan tidak Optimal                                                                                     | 2. Susun SOP jelas dan peraturan Sanksi                                                |
|    |                                                   |                                                                                      | 3. Kompetensi SDM                              | 3. Ditjen Phb Darat                                                | 3. Kurang pembinaan dan Kelemahan pengawasan atasan langsung (Internal)               | Pelayanan tidak Optimal                                                                                     | 3. Pembinaan yang menyeluruh dan rutin terkait SPM                                     |

| NO | SASARAN PROGRAM                                     | INDIKATOR PROGRAM                                  | RISIKO                                                             | PEMILIK RISIKO                                      | PENYEBAB                                                                                           | AKIBAT                                                       | MITIGASI TKT DITJEN DARAT                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                                    | 4. Tingkat Komprehensif Perencanaan                                | 4. Ditjen Phb Darat                                 | 4. Konsultan tidak profesional, Pembahasan tidak komprehensif, kesalahan penyusunan KAK (Internal) | Kegagalan Implementasi kebijakan dan Pelayanan tidak Optimal | 4. Susun SOP jelas terkait penyusunan KAK dan penyedia jasa serta teknis pembahasan hasil konsultan, SANKSI tegas kepada Konsultan dan PPK |
|    |                                                     |                                                    | 5. Perubahan Kebijakan                                             | 5. BAPPENAS. KEMENHUB, KEMENKEU                     | 5. Perubahan Kepemimpinan / Perubahan Arah Kebijakan (Internal - External)                         | Kegagalan Implementasi kebijakan dan Pelayanan tidak Optimal | 5. TIDAK ADA                                                                                                                               |
|    |                                                     |                                                    | 6. Kompetensi SDM Barjas                                           | 6. Ditjen Phb Darat                                 | 6. Tidak ada Aturan yang mengatur, kelemahan SOP, ketidakpatuhan terhadap aturan (Internal)        | Korupsi dan Maladministrasi                                  | 6. Regulasi yang ketat mengatur kompetensi PPK dan Staf Barjas, SOP rinci dan jelas serta Sanksi yang tegas                                |
| 3  | Meningkatnya keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 1. Risiko Manusia (Tingkat pemahaman, kelelahan dan Prilaku)       | Kepolisian, Ditjen Darat, Pemda Kementerian lainnya | 1. Kurangnya pelatihan dan kampanye, Ketidak patuhan dan jam kerja berlebihan.                     | Kecelakaan                                                   | 1. Memberikan Kampanye keselamatan                                                                                                         |
|    |                                                     |                                                    | 2. Risiko Kendaraan ( Kelaikan Jalan, Odol dan Modifikasi Illegal) | Ditjen Darat, Kepolisian dan Pemda                  | 2. Fungsi pengujian tidak berjalan, lemah pengawasan/penindakan                                    | Kecelakaan                                                   | 2. Peningkatan fasilitas Uji dan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan penindakan                                                |
|    |                                                     |                                                    | 3. Risiko Infrastruktur (Kerusakan, Desain Tidak standar dan       | Ditjen Bina marga, Ditjen Perhubungan Darat, Pemda  | 3. Keterbatasan anggaran, kelemahan SDM yang di mandatkan, kesalahan perencanaan,                  | Kecelakaan                                                   | 3. Audit rutin, pemasangan perlengkapan jalan dan sanksi tegas                                                                             |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | RISIKO                                        | PEMILIK RISIKO                                                 | PENYEBAB                                                                          | AKIBAT     | MITIGASI TKT DITJEN DARAT                                                                                     |
|----|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                   | ketersediaan Fasilitas Keselamatan)           |                                                                | Maladinitrasi, Perubahan Kebijakan                                                |            |                                                                                                               |
|    |                 |                   | 4. Risiko kelemahan Pengawasan dan Penindakan | Kepolisian, Ditjen Perhubungan Darat, Pemda                    | 4. Keterbatasan peralatan, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, kelemahan SDM | Kecelakaan | 4. Melakukan pengawasan dan pendindakan sesuai tugas dan fungsi serta memanfaatkan teknologi untuk pengawasan |
|    |                 |                   | 5. Perubahan lingkungan                       | Ditjen Bina Marga, Ditjen Perhubungan Darat, Pemda, Kepolisian | 5. Kurangnya pengawasan rutin, informasi yang tidak realtime                      | Kecelakaan | 5. Susun SOP pengawasan rutin dan berkoordinasi dengan KL terkait untuk data real time.                       |

#### **4.4 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029**

Matriks Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen pengendalian strategis untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan dan indikator kinerja secara efektif dan akuntabel. Matriks ini mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Pengelolaan risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal guna menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan transportasi darat secara nasional.

**Tabel 4.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Renstra BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta**

| Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                                      | RISIKO                                                                                              | PEMILIK RISIKO | PENYEBAB                                                                                                                                                                     | AKIBAT                                                                                | MITIGASI BPTD                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK 1.1.3         | Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi | IKK 1.1.3                  | Jumlah Layanan angkutan Antarmoda wilayah KSPN                                       | Target penyediaan layanan subsidi KSPN angkutan jalan tidak tercapai                                | BPTD           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan alokasi anggaran</li> <li>Rendahnya partisipasi operator</li> <li>Koordinasi lintas sektor yang belum optimal</li> </ul> | Konektivitas wilayah KSPN sepi pengunjung                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sinkronisasi perencanaan dengan pemerintah daerah</li> <li>Optimalisasi penganggaran</li> <li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan</li> </ul>         |
| SK 2.1           | Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan                                                                                          | IKK 2.1.1                  | Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM             | Peningkatan pelayanan terminal belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)                       | BPTD           | Keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi SDM                                                                                                                             | Kualitas pelayanan publik transportasi jalan belum optimal                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan pengawasan dan uji mutu pekerjaan</li> <li>Pemenuhan sarana prasarana secara bertahap</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM</li> </ul>                |
|                  |                                                                                                                                                  | IKK 2.1.2                  | Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM                                | Pelaksanaan operasional terminal belum sepenuhnya sesuai SPM                                        | BPTD           | Pengendalian dan pengawasan operasional belum optimal                                                                                                                        | Tingkat kepuasan pengguna jasa menurun                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan kebutuhan SDM dan pelatihan petugas</li> <li>Penerapan SOP operasional</li> <li>Penguatan monitoring serta evaluasi berkala</li> </ul>              |
|                  |                                                                                                                                                  | IKK 2.1.4                  | Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM    | Fasilitas penimbangan KB belum memenuhi SPM                                                         | BPTD           | Keterbatasan anggaran dan perencanaan teknik                                                                                                                                 | SPM tidak tercapai                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan prioritas peningkatan fasilitas dan penganggaran bertahap</li> <li>Pemeliharaan sarana penimbangan</li> <li>Penataan penugasan petugas</li> </ul> |
|                  |                                                                                                                                                  | IKK 2.1.5                  | Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM                       | Operasional layanan penimbangan belum memenuhi SPM                                                  | BPTD           | Disiplin pelaksanaan SOP belum konsisten                                                                                                                                     | Efektivitas pengawasan kendaraan bermotor menurun                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penegakan kepatuhan SOP</li> <li>Pengawasan internal berkelanjutan</li> </ul>                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                  | IKK 2.1.6                  | Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ | Rendahnya pemanfaatan hasil monev hingga monitoring dan evaluasi kinerja layanan LLAJ tidak optimal | BPTD           | Ketersediaan dan kualitas data kinerja belum memadai                                                                                                                         | Peningkatan pelayanan tidak berkelanjutan serta perbaikan layanan tidak tepat sasaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseminasi hasil monev dan rapat evaluasi rutin</li> <li>Penguatan sistem pelaporan kinerja</li> <li>Validasi data</li> </ul>                                |
|                  |                                                                                                                                                  | IKK 2.1.7                  | Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ                                          | Dokumen teknis pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tidak tersedia tepat waktu                    | BPTD           | Perencanaan dan koordinasi penyusunan dokumen belum optimal                                                                                                                  | Pelaksanaan kegiatan teknis terhambat                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penjadwalan penyusunan dokumen</li> <li>Reviu internal</li> <li>Standarisasi kebutuhan data dan verifikasi</li> </ul>                                        |

| Sasaran Kegiatan |                                                                              | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                                  | RISIKO                                                                                                                   | PEMILIK RISIKO | PENYEBAB                                                                                                     | AKIBAT                                                                                                                            | MITIGASI BPTD                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK 3.1           | Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang                       | IKK 3.1.1                  | Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata                | Pelaksanaan pengawasan keselamatan belum optimal                                                                         | BPTD           | Pengawasan di lapangan terbatas hingga keterbatasan sumber daya pengawasan                                   | Pelanggaran operasional hingga risiko kecelakaan lalu lintas meningkat                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Penguatan pengawasan rutin dan penegakan sanksi</li> <li>· Penataan jadwal pengawasan</li> <li>· Sinergi dengan instansi terkait</li> </ul>                                                                        |
|                  |                                                                              | IKK 3.1.2                  | Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang                           | Kecelakaan kendaraan angkutan barang                                                                                     | BPTD           | Pengemudi tidak disiplin, kondisi kendaraan buruk, jalur tidak aman                                          | Kerusakan barang, cedera, kerugian finansial                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pemeriksaan kendaraan rutin</li> <li>· Pelatihan keselamatan bagi pengemudi</li> <li>· Penetapan rute aman</li> </ul>                                                                                              |
| SK 3.2           | Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety | IKK 3.2.1                  | Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman | Ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan dengan pedoman hingga pemeriksaan rancang bangun tidak sepenuhnya sesuai ketentuan | BPTD           | Kesalahan teknis, kurangnya pemahaman petugas hingga keterbatasan alat uji dan pengawasan teknis             | Kendaraan tidak layak operasi, potensi kecelakaan                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pelatihan petugas secara berkala</li> <li>· Checklist pemeriksaan sesuai pedoman</li> <li>· Review dokumen teknis sebelum pemeriksaan</li> <li>· Penguatan SOP pemeriksaan</li> <li>· Pengawasan teknis</li> </ul> |
|                  |                                                                              | IKK 3.2.2                  | Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB                                 | Kegiatan kalibrasi alat uji tidak terlaksana tepat waktu serta pemeriksaan fisik alat uji terlewat atau tidak lengkap    | BPTD           | Human error, prosedur tidak lengkap                                                                          | Alat cacat tetap digunakan sehingga akurasi hasil pengujian menurun, risiko keselamatan meningkat                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Checklist pemeriksaan lengkap</li> <li>· Audit internal berkala</li> <li>· Pengawasan dan rotasi petugas pemeriksa</li> </ul>                                                                                      |
|                  |                                                                              | IKK 3.2.3                  | Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi                                    | Alat yang diterima tidak sesuai spesifikasi                                                                              | BPTD           | Spesifikasi tidak jelas, kesalahan supplier                                                                  | Alat tidak dapat digunakan, biaya tambahan                                                                                        | Penyusunan rencana pengadaan secara lebih awal seperti spesifikasi teknis rinci dalam dokumen pengadaandan terintegrasi                                                                                                                                     |
| SK 3.3           | Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan                            | IKK 3.3.1                  | Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis         | Pemasangan perlengkapan jalan tidak sesuai standar teknis                                                                | BPTD           | Pengendalian mutu pekerjaan belum optimal seperti kesalahan desain, material tidak sesuai, kurang pengawasan | Penurunan tingkat konflik lalu lintas tidak signifikan hingga kegagalan fungsi, bahaya bagi pengguna jalan, reputasi BPTD menurun | Penguatan pengawasan teknis dan reviu spesifikasi serta pemeriksaan material dan desain sebelum pemasangan                                                                                                                                                  |

| Sasaran Kegiatan |                                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                | RISIKO                                                                                                              | PEMILIK RISIKO | PENYEBAB                                                                                                                                            | AKIBAT                                                                                                                 | MITIGASI BPTD                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                  | IKK 3.3.2                  | Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman                                                          | Intervensi penanganan lokasi rawan kecelakaan tidak tepat sasaran seperti kesalahan penempatan intervensi di lokasi | BPTD           | Data lokasi rawan kecelakaan belum mutakhir                                                                                                         | Penanganan tidak efektif, potensi kecelakaan tetap tinggi                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Verifikasi lokasi berdasarkan data terkini</li> <li>· Koordinasi antar tim survei dan pelaksana</li> <li>· Penggunaan GPS dan teknologi pemetaan</li> <li>· Pemutakhiran dan validasi data lokasi rawan kecelakaan</li> </ul> |
|                  |                                                                  | IKK 3.3.3                  | Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman                                        | Penerapan manajemen kecepatan belum efektif seperti penempatan alat pengendali kecepatan tidak akurat               | BPTD           | Data lokasi tidak akurat, pengukuran salah serta rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan                                                         | Efektivitas intervensi rendah, risiko kecelakaang tetap tinggi sehingga risiko kecelakaan lalu lintas tetap tinggi     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Verifikasi lokasi berdasarkan data terkini</li> <li>· Koordinasi antar tim survei dan pelaksana</li> <li>· Penggunaan GPS dan teknologi pemetaan</li> <li>· Sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum</li> </ul>             |
| SK 3.4           | Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang           | IKK 3.4.1                  | Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman                                                                             | Partisipasi masyarakat rendah sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi keselamatan jalan kurang efektif            | BPTD           | Sosialisasi kurang efektif, jadwal tidak sesuai                                                                                                     | Perubahan perilaku keselamatan belum optimal, dampak program berkurang, dan kesadaran keselamatan jalan rendah         | Libatkan komunitas lokal dan sekolah serta Inovasi metode sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                  | IKK 3.4.2                  | Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda | Pelaksanaan edukasi keselamatan usia dini belum optimal                                                             | BPTD           | Keterbatasan tenaga pendukung dan media edukasi                                                                                                     | Penanaman budaya keselamatan sejak dini belum maksimal                                                                 | Kerja sama dengan satuan pendidikan dan pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                              |
| SK 4             | Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat | IKK 4.1                    | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)                                                          | Dokumen perencanaan pembangunan tidak selaras dengan kebijakan nasional dan Renstra Ditjen Perhubungan Darat        | BPTD           | Sinkronisasi perencanaan pusat dan UPT belum optimal serta keterbatasan kualitas data perencanaan                                                   | Pembangunan tertunda, target tahunan tidak tercapai                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Penguatan koordinasi perencanaan</li> <li>· Reviu dokumen perencanaan secara berjenjang</li> <li>· Peningkatan kualitas data</li> </ul>                                                                                       |
|                  |                                                                  | IKK4.2                     | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)                                                                           | Nilai SAKIP BPTD tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga proses evaluasi kinerja tertunda                    | BPTD           | Penerapan manajemen kinerja belum konsisten sehingga beban kerja tinggi, jadwal evaluasi tidak teratur dan kualitas pelaporan kinerja belum memadai | Tindak lanjut perbaikan kinerja terlambat, target SAKIP tidak tercapai hingga akuntabilitas kinerja organisasi menurun | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Penguatan cascading kinerja</li> <li>· Monitoring kinerja berkala</li> <li>· Pendampingan SAKIP</li> </ul>                                                                                                                    |
|                  |                                                                  | IKK4.3                     | Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)                                                               | Nilai IKPA tidak meningkat memenuhi target kinerja anggaran                                                         | BPTD           | Perencanaan anggaran kurang matang/tidak tepat dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi program tidak sesuai target                | Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menurun                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan prioritas</li> <li>· Perbaikan perencanaan anggaran</li> <li>· percepatan pelaksanaan kegiatan</li> <li>· Monitoring realisasi anggaran</li> </ul>                                   |

| Sasaran Kegiatan |  | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                                                       | RISIKO                                                                                                                       | PEMILIK RISIKO | PENYEBAB                                                                                                                                | AKIBAT                                                                                                                                              | MITIGASI BPTD                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  | IKK4.4                     | Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) | Kurangnya pemahaman staf terhadap proses tindak lanjut sehingga tindak lanjut rekomendasi BPK tidak diselesaikan tepat waktu | BPTD           | Koordinasi internal yang lemah dan keterbatasan pemahaman pada proses tindak lanjut                                                     | Proses tindak lanjut lambat atau tidak sesuai pedoman sehingga dapat menimbulkan opini dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan menurun | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pembentukan tim tindak lanjut</li> <li>· Monitoring penyelesaian rekomendasi</li> <li>· Pendampingan teknis staf baru oleh mentor berpengalaman</li> </ul>                        |
|                  |  | IKK4.6                     | Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (nilai LKE)             | Pembangunan Zona Integritas tidak mencapai nilai yang ditetapkan serta kurangnya komitmen unit terhadap pembangunan ZI       | BPTD           | Sosialisasi terbatas, kurangnya pemahaman manfaat ZI                                                                                    | Implementasi ZI tidak optimal, nilai LKE rendah dan terhambatnya pencapaian WBK/WBBM                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kampanye internal tentang pentingnya ZI</li> <li>· Penguatan agen perubahan</li> <li>· Pemenuhan eviden LKE</li> <li>· Evaluasi berkala</li> </ul>                                |
|                  |  | IKK4.7                     | Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                        | Proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan dan dokumentasi pengadaan tidak lengkap atau tidak akurat            | BPTD           | Sistem dokumentasi manual, human error, kelalaian petugas serta keterbatasan kompetensi SDM PBJ dan perencanaan pengadaan belum optimal | Potensi temuan audit dan keterlambatan kegiatan hingga sulit evaluasi dan audit pengadaan dapat terganggu                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Audit internal berkala atas dokumentasi pengadaan</li> <li>· Peningkatan kompetensi SDM PBJ</li> <li>· Perencanaan pengadaan dini</li> <li>· Pengawasan proses PBJ</li> </ul>     |
|                  |  | IKK4.8                     | Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)                                     | Penerapan sistem merit SDM belum berjalan optimal sehingga penilaian kinerja tidak objektif                                  | BPTD           | Kurangnya pemahaman sistem penilaian & Manajemen SDM berbasis kinerja belum konsisten                                                   | Ketidakadilan dan rendahnya motivasi serta Penurunan profesionalisme dan kinerja pegawai                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian kinerja</li> <li>· Penguatan manajemen talenta</li> <li>· Penilaian kinerja objektif</li> <li>· Pengembangan kompetensi SDM</li> </ul> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan transportasi darat pada khususnya dan pembangunan nasional di segala bidang pada umumnya, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

#### **5.2 Arahan Pimpinan**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029. Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025-2029 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan

akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

### **5.3 Mekanisme Evaluasi**

Dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025– 2029 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan.

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).